

**Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua  
Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina**

**SKRIPSI**



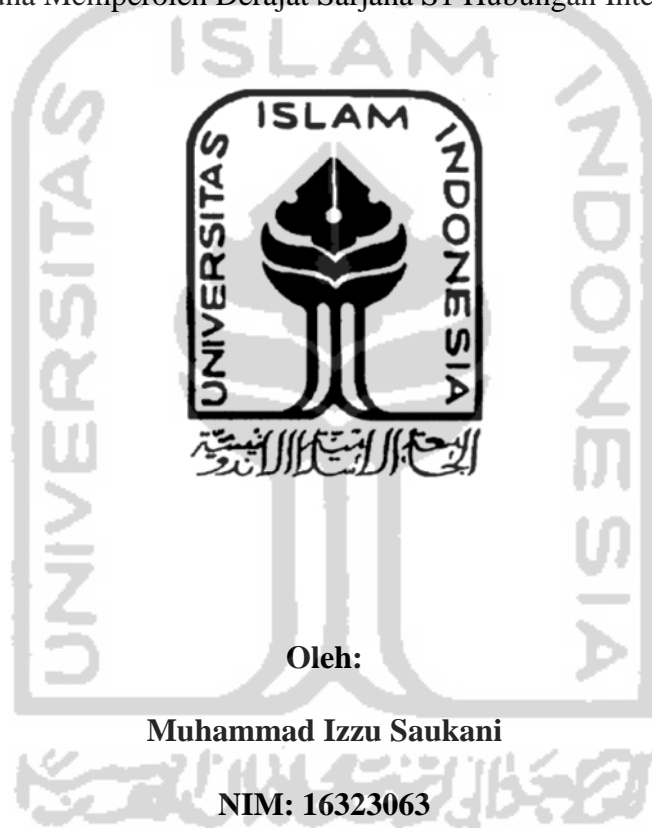
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua  
Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan  
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Muhammad Izzu Saukani**

**NIM: 16323063**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**2 September, 2020**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

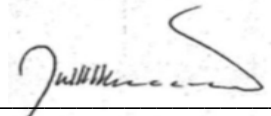
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

- 1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Tanda Tangan



## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Izzu Saukani  
NIM : 16323063  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Tugas Akhir : Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan Tugas Akhir/skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan pembuatan skripsi oleh orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 September, 2020

Yang menyatakan



Muhammad Izzu Saukani

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan penulisan skripsi yang berjudul ;

### **“Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina”**

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada ;

#### **Ibu dan Ayah Tercinta**

Terimakasih telah senantiasa berkorban tenaga, pikiran bahkan materil selama penulis menjalani studi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang selama ini telah diberikan, serta do'a yang sangat begitu tulus. Hal itu merupakan karunia terbesar yang diberikan Allah kepada penulis.

Dan karya sederhana ini aku bingkiskan kepada ;

#### **Adik-adikku Tercinta**

Teruntuk adikku Erwanul dan Ayu karya ini kuperssembahkan untuk kalian. Semoga kalian mengikuti jejak kakakmu ini.

Serta karya sederhana ini aku sematkan kepada ;

#### **Keluarga Besar Tercinta**

Kepada keluarga besarku yang tidak bisaku sebut satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepadaku.

HALAMAN MOTTO

*“Ilmu bagaikan hewan buruan, dan tulisan/pena adalah ibarat tali pengikatnya”*

*Imam Syafi'i R.A*

*“Tanamlah diri dalam tanah kerendahan, sesuatu tidak ditanam hasilnya tidak akan sempurna”*

*Penulis*

## PRAKATA



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraa Kaatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan bagi semesta Alam atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kedua kalinya tak lupa iringan Solawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, karena berkat dialah semua insan di muka bumi ini bisa terbebas dari kebodohan terutama dalam hal Ilmu Pengetahuan.

Kesyukuran besar bagi penulis atas capaian dapat menyelesaikan tanggung jawab ini, sebagai syarat guna memperoleh derajat sarjana S1 jurusan Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa semua proses yang sudah dilalui penulis tidak akan terlaksana dengan sendirinya tanpa campur tangan banyak pihak yang ikut terlibat dalam penelitian ini, dan oleh karenanya dalam lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih dihaturkan penulis kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta bapak (Muzhiri M.t.h) dan Ibu (Husniati) yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan baik moril maupun materil selama penulis menempuh studi di UII. Serta tak lupa seluruh adik-adikku tercinta (Erwanul Kholek dan Ayu Hatika Mesra) terimakasih atas dukungan, bimbingan, dan hiburan *by phone* nya selama penulis dalam perantauan. Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Alloh SWT, Aamiin.

2. Dr. Asmuni M.A. selaku paman, terimakasih atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk melakukan diskusi terkait masalah dalam penelitian, serta selalu memberikan inspirasi dan motivasi agar penulis selalu meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.
3. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih atas arahan, saran, dan juga ilmunya, serta tak henti-hentinya memberikan semangat pada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Alhamdulillah. Terimakasih atas kesabaran, perhatian dan waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan.
4. Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis terkait poin-poin penting yang seharusnya dimasukkan dalam Skripsi penulis.
5. Bapak Willi Ashadi, S.H.I., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis terkait bagaimana tata cara penulisan skripsi yang baik, dan setiap kali ketemu selalu menanyakan perkembangan Tugas Akhir penulis, serta selalu menasehati penulis tentang pentingnya memanfaatkan waktu.
6. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S. yang telah mengajarkan kepada penulis tentang arti kedisiplinan selama penulis menimba ilmu di prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Sekaligus dosen pembimbing akademik saya, terimakasih atas dukungan dan memotivasi saya untuk menyelesaikan penelitian ini.



8. Bapak Dr. H. Fu'ad Nashori S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Ibu/Bapak dosen jurusan Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, terimakasih atas banyak ilmu yang telah diajarkan tanpa mengenal lelah **“jasa kalian tak pernah kulupakan”** sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Segenap keluarga Kos al-Kahfi tidak bisa penulis sebut satu per satu, terimakasih atas dukungan teman-teman semua, serta kebersamaan kalian dalam perantauan baik senang maupun duka telah kita lewati bersama. Semoga kita semua menjadi insan yang bermartabat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Salam teman seperjuangan di tanah rantauan.
11. Kepada seluruh teman-teman musrif pesantrenisasi UII 2017-2020, terimakasih telah memberikan banyak pembelajaran pada penulis terutama arti kehidupan yang sesungguhnya.
12. Segenap keluarga Muallim FPSB UII, terimakasih telah memberikan kesempatan pada penulis dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri penulis terutama dalam mengajarkan petuah-petuah keagamaan.
13. Segenap keluarga Semeton Kec. Suralaga Jogja (SKSJ) terimakasih atas semua pembelajaran yang kalian berikan, terutama arti kebersamaan di tanah rantauan,
14. Seluruh keluarga besar pondok pesantren MTS, MA Uf Pao'lombok, terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di tempat yang penuh barokah ini.
15. Kepada seluruh teman-teman alumni IPA angkatan 2016 MA Uf Pao'lombok, terimakasih atas kebersamaannya selama penulis menuntut ilmu bersama kalian hingga hari ini tidak

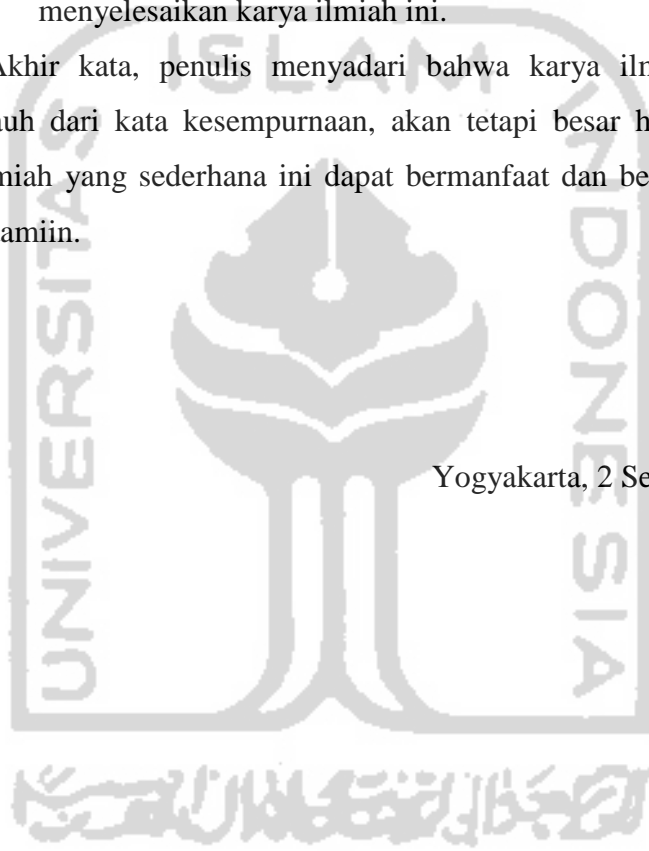
pernah terputus, salam slogan kita “Nggak Pintar Nggak Gaul”.

16. Untuk kamu, wanita spesial sang bersenyum manis yang membuatku terus bersemangat untuk menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Terimakasih atas dorongan, kasih sayang, kesabaran dan yang tak hentinya memberikan semangat dan do’a kepadaku.

17. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ilmiah/skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, aamiin.

Yogyakarta, 2 September, 2020



**Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan “Solusi Dua  
Negara” Dalam Konflik Israel-Palestina**

**SKRIPSI**



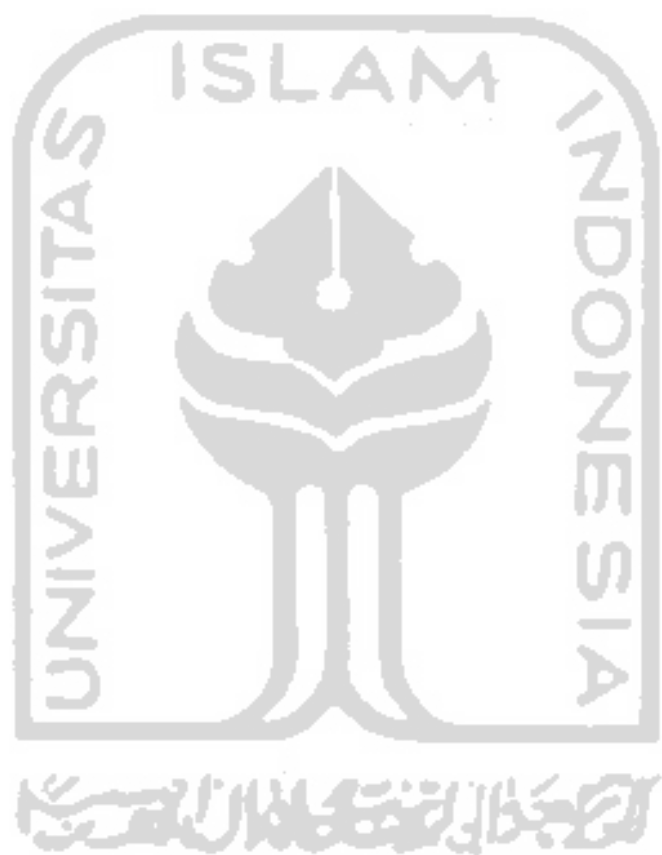
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
Abstrak.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Signifikansi Penelitian .....	6
1.5 Cakupan Penelitian .....	7
1.6 Tinjauan Pustaka .....	8
1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan atau Model .....	15
1.8 Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II : PARADIGMA SOLUSI DUA NEGARA DAN HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN YORDANIA TETAP KONSISTEN MENDUKUNG SOLUSI DUA NEGARA DARI ASPEK <i>INTERNAL SETTING</i>.....</b>	<b>27</b>
2.1 Paradigma Solusi Dua Negara.....	27
2.2 Yordania Dan Solusi Dua Negara.....	30
2.3 Upaya Yordania Terhadap Solusi Dua Negara Sebagai Solusi Akhir .....	34
2.4 Faktor <i>Internal Setting</i> Mempengaruhi Kebijakan Yordania Tetap Konsisten Mendukung Solusi Dua Negara.....	39
2.4.1 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Yordania .....	41
2.4.2 Pengaruh Dari Berbagai Kelompok Kepentingan .....	53
2.4.3 Pengaruh Ideologi.....	62
<b>BAB III : HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN YORDANIA TETAP MENDUKUNG SOLUSI DUA NEGARA DARI ASPEK <i>EKSTERNAL SETTING</i> .....</b>	<b>67</b>
3.1 Faktor <i>Eksternal Setting</i> Mempengaruhi Kebijakan Yordania Tetap Konsisten Mendukung Solusi Dua Negara .....	67

3.1.1 Wacana Yordania Dijadikan Tanah Air Alternatif Bagi Warga Palestina “ <i>al-Watan al-Badil</i> ” .....	67
3.1.2 Ancaman Stabilitas Keamanan dari Kelompok Radikalis .....	75
3.1.3 Kondisi Perpolitikan Timur Tengah .....	85
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
4.1 Kesimpulan .....	92
4.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

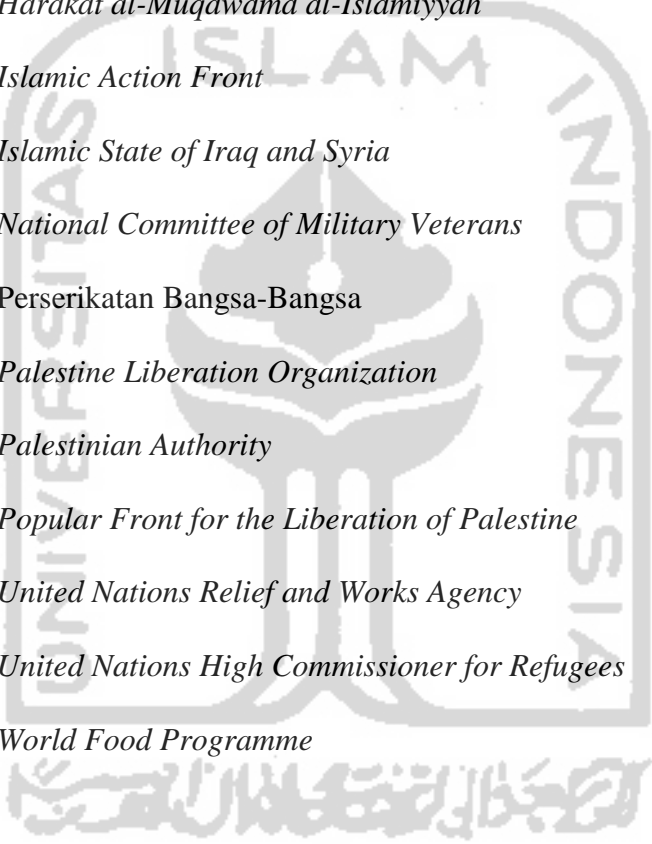


## DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Decision Making oleh Richard Snyder .....	19
Gambar 2 : Penerapan Teori <i>Decision Making</i> Richard Snyder Dalam Kebijakan Yordania Tetap Mendukung Solusi Dua Negara .....	22
Gambar 3 : Peningkatan Populasi Pengungsi Yordania 1990-2019 .....	43
Gambar 4 : Hutang Pemerintah Yordania Terhadap PDB .....	47
Gambar 5 : Tingkat Pengangguran Yordania 1984-2019 .....	48
Gambar 6 : Pertumbuhan Populasi Yahudi di Tepi Barat 1970-2020 .....	73



## DAFTAR SINGKATAN



API	: <i>Arab Peace Initiative</i>
DFLP	: <i>Democratic Front for the Liberation of Palestine</i>
DoF	: <i>Declaration of Principles</i>
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
HAMAS	: <i>Harakat al-Muqawama al-Islamiyyah</i>
IAF	: <i>Islamic Action Front</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
NCMV	: <i>National Committee of Military Veterans</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PLO	: <i>Palestine Liberation Organization</i>
PA	: <i>Palestinian Authority</i>
PFLP	: <i>Popular Front for the Liberation of Palestine</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>

## Abstrak

Dinamika konflik Israel-Palestina dari masa ke masa selalu menarik untuk di bahas. Konflik yang sudah berkepanjangan ini masih belum menemukan jalan keluar untuk melakukan perdamaian. Banyak negara, antara lain Yordania melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik ini. Yordania dalam hal ini selalu konsisten mendukung solusi dua negara sebagai status akhir dalam konflik. Yordania mendukung pembentukan negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan bersama Israel adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis yang telah lama membara. Dengan menggunakan teori Richard Snyder mengenai *Decision Making Process*, studi ini pun berupaya mengupas dua latar utama sebagai latar belakang kebijakan luar negeri Yordania tetap mendukung solusi dua negara sebagai status akhir dalam menyelesaikan konflik kedua blok. Latar internal dan eksternal merupakan dua aspek penting dalam kebijakan luar negeri yang Yordania ambil terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina. Adapun latar internal itu mencakup, kondisi sosial, ekonomi dan politik, pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan, serta faktor Ideologi yang berkembang di Yordania. Sedangkan latar eksternal terdiri dari, wacana Yordania dijadikan Tanah Air Alternatif bagi warga Palestina "*al-Watan al-Badil*", ancaman stabilitas keamanan dari kelompok radikal, serta kondisi perpolitikan Timur Tengah.

Kata-Kunci : Yordania, Israel-Palestina, Solusi Dua Negara, *Decision Making*, Latar Internal, Eksternal

## Abstract

The dynamics of the Israeli-Palestinian conflict from time to time are always interesting to discuss. This prolonged conflict still has not found a way to peace. Many countries, including Jordan, have made various efforts to end this conflict. Jordan in this case has always been consistent in supporting the two-state solution as the final status in the conflict. Jordan supports the establishment of a Palestine state, with East Jerusalem as its capital, and with Israel is the only way to resolve the long-running crisis. Using Richard Snyder's theory of the Decision Making Process, this study is trying to explore two main setting are as the background of Jordan's foreign policy while supporting the two-state solution as the final status in resolving conflicts between the two blocs. Internal and external setting are two important aspects in the foreign policy that Jordan took regarding the Israeli-Palestinian conflict resolution. The internal setting covers, social, economic, and political conditions, the influence of various interest groups, and the ideological factors that developed in Jordan. While the external setting consists of, the discourse of Jordan made an Alternative Homeland for Palestinians "*al-Watan al-Badil*", the threat of security stability from radical groups, as well as Middle Eastern political conditions.

Keywords : Jordan, Israel-Palestina, *Two State Solution*, *Decision Making*, *Internal*, *Eksternal Setting*



## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik antar negara merupakan salah satu isu hangat yang masih mewarnai perpolitikan dunia internasional, hal ini salah satunya dikarenakan adanya perebutan wilayah antar negara. Salah satu konflik internasional mengenai perbatasan wilayah yang pernah terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini yaitu konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik antara keduanya tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun terutama sejak berdirinya negara Zionis Israel pada tahun 1948. Pada dasarnya konflik antara Israel-Palestina menyangkut dua isu pokok, yaitu masalah hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dan hak bangsa Yahudi untuk memilih negaranya sendiri (Israel) dan hidup tentram dan damai dengan tetangga arabnya (Mawardi, 1991, p. 17).

Konflik antara Israel-Palestina terjadi setelah Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour disusun oleh Inggris pada rapat Kabinet tanggal 31 Oktober 1917, yang berisikan sebuah persetujuan atas gagasan pendirian negara baru oleh bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini merupakan awal keberhasilan diplomasi politik bangsa Yahudi yang pada saat itu berupaya untuk mendirikan sebuah negara di tanah Palestina. Sejak dicetuskan Deklarasi Balfour penetrasi kaum Yahudi mulai masuk ke wilayah Palestina, hingga menemukan momentumnya di tahun 1948, yaitu pada periode ini bangsa Yahudi memproklamkan berdirinya negara mereka yaitu Israel di tanah Palestina. Sontak melihat hal tersebut, semua negara Arab seperti Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya melakukan

penyerangan terhadap Israel. Namun peperangan tersebut dimenangi oleh Israel yang berhasil merebut 70% dari total luas wilayah yang diberikan oleh PBB. Karena pada sebelumnya PBB lah yang membagi wilayah Palestina dalam hasil sidang Resolusi PBB No. 181 tahun 1947, yang menegaskan membagi dua tanah Palestina yaitu 56% untuk Israel dan sisanya 44% untuk Arab (Kumoro, 2009, p. 23). Kemenangannya dalam perang tersebut telah menciptakan perubahan mendasar bagi Israel, apalagi Israel kembali mendominasi berbagai perang lanjutan, mulai dari perang enam hari (*Six Days War*) tahun 1967, hingga perang Youm Kippur tahun 1973, yang pada kenyataannya membuat negara-negara Arab tidak dapat berbuat banyak, kecuali Israel menjadi sah berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplok beberapa negara Arab yang sudah disebutkan di atas (Muchsin, 2015, p. 398).

Kekalahan pada perang besar tahun 1967 telah meruntuhkan moral bangsa Arab. Konsep diri yang mengembangkan bangsa Arab secara hiperbolik sebagai bangsa yang besar, sontak runtuh. Ideologi Pan-Arabisme yang menjadi ruh negara-negara Arab telah menjadi utopia belaka. Bahkan seperti yang diketahui negara Arab yang sejak 1948 menggunakan rasa permusuhan terhadap Israel sebagai motivasi yang sangat kuat guna terbentuknya tindakan kolektif bersama, seolah-olah sirna. Perubahan politik pun terjadi di Timur Tengah, masing-masing negara Arab menempuh jalan kepentingannya sendiri dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, seperti halnya dilakukan Yordania.

Secara geografis dan politis, Yordania sangat memiliki arti penting di Timur Tengah, terutama karena berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina. Oleh karenanya, Yordania selalu memperlakukan konflik Israel-Palestina sebagai

urusan rumah tangganya. Kedekatan geografis dan realitas demografis membuat Yordania hampir tidak mungkin lolos dari dampak potensial dari konflik atau penyelesaian apapun yang terkait dengan masalah Palestina. Ini dikarenakan sebagian besar terkait dengan demografi Yordania, di mana setengah dan dua pertiga penduduknya berasal dari Palestina. Yordania adalah satu-satunya negara yang memberikan hak dan kewarganegaraan bagi sebagian besar pengungsi Palestina. Kendati demikian Yordania memainkan perpolitikan yang begitu pragmatis dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Hal ini tercermin dari sikap Yordania selama ini dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak.

Sebagai sekutu aliansi As di Timur Tengah, Yordania bersama Mesir juga merupakan dua negara Timur Tengah yang telah menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi dengan Israel. Perjanjian damai Yordania-Israel dicapai pada tahun 1994. Berdasarkan perjanjian tersebut membuat kedua negara ini menjalin hubungan diplomatik baik dalam hal keamanan, perdagangan, air dan beberapa usaha patungan dan proyek infrastruktur (Mitha, 2010, p. 105). Selain itu, deklarasi perdamaian tersebut melindungi Yordania atas tempat suci Islam di Yerusalem, di mana Israel menyatakan akan memberikan prioritas tinggi untuk perannya dalam setiap negosiasi status akhir (The Washington Declaration, 1994).

Di lain sisi, masalah Palestina berada di jantung kebijakan luar negeri Yordania. Dalam hal ini Yordania tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dengan memperjuangkan solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Hal ini tidak lepas dari berbagai tekanan domestik dalam negeri mengenai dukungan terhadap Palestina yang menjadi bagian dari warna perpolitikan diplomasi negara ini di kancah perpolitikan Timur Tengah.

Berbagai bantuan dan dukungan diberikan pada Palestina oleh Yordania yang mengartikan memihak kepada Palestina dalam konflik ini. Namun, hubungan Yordania dengan Israel tidak dapat dielakkan. Hubungan informal Yordania dan Israel ini pada awalnya sudah terjalin sejak lama, bisa dibilang Yordania berurusan dengan Israel dengan cara pragmatis. Sebelum perang 1948 misalnya, Raja Abdullah dari Yordania bertemu dengan para pemimpin Zionis dan menegosiasikan pembagian Palestina antara orang Arab dan orang Yahudi dan menyetujui rencana pemisahan PBB tahun 1947, yang menyerukan agar orang Arab dan Yahudi hidup berdampingan di dua negara bagian yang terpisah. Namun, Yordan juga berpartisipasi dalam perang 1948-49, sebagian besar mungkin karena tekanan Arab dan kerusuhan domestik yang mengancam stabilitas rezim (Mitha, 2010, p. 108). Selama pertempuran, kedua belah pihak juga mematuhi kesepakatan mereka, dengan Israel merebut sebagian besar Palestina dan Kerajaan Hashemite Yordania menguasai Tepi Barat (Tal, 1993, p. 168).

Hubungan antara Yordania dan Israel terus berlanjut dan memberikan sinyal untuk negara Arab lainnya berurusan dengan Israel. Salah satunya adalah Mesir. Pada pertengahan 1970-an Mesir memulai melakukan negosiasi secara langsung dengan Israel yang mengarah pada perjanjian perdamaian. Yordania dalam hal ini tidak ingin mengikuti langkah Mesir sebelum adanya persetujuan dari negara Arab lainnya. Selain itu, Yordan rupanya percaya bahwa dengan tidak adanya dukungan luas dari Arab untuk melegitimasi setiap pembicaraan politik dengan Israel, kekuasaannya sendiri di Tepi Timur bisa terancam. Akibatnya, kepemimpinan Yordania menolak pada saat itu untuk berpartisipasi dalam proses

Camp David dan skeptis terhadap proposal As karena melanggengkan kendali Israel atas Tepi Barat (Banimelhem, 2008, p. 131).

Melihat pengalamannya yang begitu rumit dalam menghadapi pendudukan Israel di tanah Palestina, Yordania menyadari bahwa sulit untuk mencapai perubahan dalam mengakhiri konflik ini. Raja Hussein sendiri mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah kekuatan struktural internal dari negara-negara Arab untuk dapat mencapai perdamaian. Oleh karenanya, bagi Hussein orang Arab harus menerima keberadaan negara Israel di wilayah tersebut, jika ini tidak terjadi, akan sulit bagi masing-masing pihak terutama Yordan yang begitu lemah untuk melanjutkan tujuan dalam mengakhiri konflik antara Israel-Palestina (Banimelhem, 2008, p. 131).

Setelah perang teluk, Yordania memulai merestrukturisasi keadaan domestiknya dan berusaha merehabilitasi dirinya sendiri di mata barat. Raja Hussein saat itu dengan cepat menerima undangan bersama Amerika Serikat-Soviet untuk menghadiri konferensi perdamaian Timur Tengah di Madrid pada Oktober 1991. Konferensi Madrid ini menandakan dimulainya negosiasi langsung antara Israel dan negara-negara Arab. Yordania dalam hal ini menyediakan payung pendukung bagi rakyat Palestina dengan menyetujui untuk membentuk delegasi gabungan. Reaksi ini memungkinkan Palestina untuk mengedepankan agenda utamanya yaitu menjadi negara independen. Dukungan ini diperkuat dengan pernyataan pembukaan Yordania dalam konferensi ini yang menyatakan, “bahwa Yordania tidak pernah menjadi Palestina dan tidak akan pernah menjadi seperti itu” (The Madrid Conference Opening Speeches, 1991).

Banyak hal yang sudah dilakukan Yordania untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian antara Israel-Palestina. Hal tersebut tercermin dari beberapa kebijakan Yordania selama ini. Terkait dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina misalnya, Yordania dari dulu hingga sekarang masih konsisten dengan solusi dua negara, hal ini kembali tercermin dari komitmen negara ini pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 Liga Arab pada 2017 di Amman, di mana Yordania mendukung pembentukan negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan bersama Israel adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis yang telah lama membara. Selain itu Raja juga mengatakan bahwa setiap rencana perdamaian perlu dilaksanakan sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang menyerukan Israel untuk menarik kembali dari semua tanah yang didudukinya pada tahun 1967 (Muasher, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa dalam penelitian ini adalah terkait '**Mengapa Yordania Konsisten Menawarkan "Solusi Dua Negara" Dalam Konflik Israel-Palestina ?**'

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan Yordania mengapa tetap konsisten menawarkan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Dalam topik yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan Yordania terkait solusi dua negara khususnya dalam konflik Israel-Palestina

merupakan sebuah isu yang dapat dikatakan cukup penting dibahas dalam penelitian ini. Mengingat konflik antara Israel-Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang masih menjadi bahasan dunia internasional. Peliknya konflik kedua blok ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sikap atau langkah negara Arab dalam menghadapi Israel. Perbedaan langkah diantara negara Arab tidak bisa dipungkiri, sehingga dapat dilihat sampai sekarang konflik Israel-Palestina masih mewarnai geopolitik Timur Tengah. Maka dari itu, signifikansi dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional terutama dalam pengembangan studi konflik khususnya di regional Timur Tengah.

Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan atau pun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan acuan terkait masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait kebijakan Yordania khususnya dalam konflik Israel-Palestina yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Mengingat banyaknya perkembangan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian yang diangkat. Maka dari itu batasan-batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada konsistensi kebijakan yang dilakukan Yordania terkait solusi dua negara dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Di samping itu jangka waktu yang diambil dalam

penelitian ini adalah mulai dari tahun 1990-2019. Karena pada periode ini menurut penulis Yordania mulai melihat solusi dua negara sebagai solusi terbaik dalam mengakhiri konflik yang sudah lama terjadi antara Israel-Palestina.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Berbicara mengenai konflik Israel-Palestina, sudah banyak literatur yang membahas terkait permasalahan ataupun isu tersebut. Terkait dalam hal ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan topik pembahasan yang diangkat penulis, selanjutnya akan dilakukan perbandingan dengan topik penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertama adalah penelitian yang berjudul “*Jordanian Foreign Policy toward The Palestine Issue*”. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan Yordania terhadap isu Palestina. Penelitian ini memaparkan bahwa Raja atau para pemimpin Yordania mulai dari raja Abdullah I hingga Abdulllah II, telah secara aktif peduli mendukung hak-hak Arab Palestina. Pemimpin pertama Yordania Raja Abdullah, sangat memainkan peran penting pada permasalahan Palestina. Abdullah menentang kependudukan Yahudi yang pada saat itu akan mendirikan negara Israel, namun di sisi lain Abdullah juga menentang kepemimpinan Palestina di Gaza. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Palestina di Gaza tidak mendasar, hingga pada tahun 1950 Raja Abdullah secara resmi mencaplok Tepi Barat di bawah perlindungannya. Peran penting juga dimainkan oleh Raja Hussein. Hussein dianggap sebagai tokoh kunci dalam setiap negosiasi dalam permasalahan Palestina. Meskipun demikian Selama periode antara 1953-1999, hubungan Yordan dengan Palestina ditandai oleh lemahnya legitimasi yang disebabkan karena adanya ketidakpercayaan orang Arab Palestina terhadap



Yordania. Setelah sepeninggalan Raja Hussein dan kendali pemerintahan dipegang oleh Raja Abdullah II. Abdullah II pun tidak mengarah pada perubahan mendasar dalam memandang konflik Arab-Israel. Sejak 1999, Raja Abdullah percaya bahwa masalah inti di wilayah ini adalah masalah antara Palestina dan Israel, dan Ia berupaya mengembalikan permasalahan tersebut ke meja perundingan (Nasur, Al-Fawwaz & Al-Afif, 2012, p. 2-4).

Penelitian di atas tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Di mana penelitian ini fokus menyoroti kebijakan para pemimpin Yordania dalam menyikapi isu Palestina, mulai dari Raja Abdullah I sampai Abdullah II. Sedangkan penelitian ini lebih fokus menyoroti kebijakan Yordania terkait solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, fokus penelitian ini terletak pada rentang waktu mulai dari tahun 1990 hingga 2019, yang tentunya menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang di atas.

Kedua adalah penelitian yang berjudul "*Jordan's Policy towards the Peace in the Middle East*". Fokus penelitian ini adalah adanya keterkaitan faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan Yordania dalam proses perdamaian Timur Tengah. Dalam hal ini, Banimelhem menjelaskan bahwa Yordania mengikuti kebijakan praktis dan rasional dalam berurusan dan hubungannya dengan proses perdamaian di Timur Tengah. Sikap ini bukan tanpa alasan, dimana kondisi pada saat itu mendesak Yordania harus bersikap hati-hati dan mempertimbangkan apa yang menjadi keputusan luar negerinya. Kondisi yang dimaksud di sini adalah lemahnya keadaan internal yaitu perekonomian Yordania serta faktor eksternal yaitu kebutuhannya akan dukungan Amerika. Banimelhem menjelaskan bahwa selama ekonomi Yordania tetap lemah dan lebih

rendah dari Israel, Yordania tidak dapat mencapai pengakuan dan kekuasaan. Oleh karenanya, Banimelhem menyimpulkan perilaku politik pemerintah Yordania muncul sebagai akibat dari ketidakmampuannya untuk menjauh dari kepemimpinan dan kendali Amerika (Banimelhem, 2008).

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis. Dimana penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Yordania dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis adalah mengenai konsistensi kebijakan Yordania terkait solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Namun, penelitian tersebut masih memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu setidaknya penelitian tersebut dapat menjawab apa yang menjadi faktor pertimbangan Yordania dalam mengambil suatu kebijakan terhadap perdamaian Israel-Palestina.

Ketiga adalah artikel yang berjudul “*The Deal of the Century and Jordan’s Dilemma*”. Artikel ini membicarakan rencana Amerika Serikat mengakhiri konflik Israel dan Palestina yang mereka sebut sebagai Kesepakatan Abad Ini (*Deal of the Century*). Rencana perdamaian tersebut didukung oleh sebagian negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan beberapa negara teluk. Lebih jauh, artikel ini juga menjelaskan kekhawatiran Yordania, di mana dalam hal ini Yordan menolak keras skenario yang direncanakan oleh AS tersebut. Yordan menganggap rencana tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya. Dalam hal ini, Yordan tetap kekeh mengusung solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina berdasarkan perbatasan 1967 yang mengarah pada negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Namun pada saat yang sama Yordan menghadapi tekanan besar dari

sekutu, bagaimanapun Yordania merupakan penerima utama bantuan dari AS, dan akan menghadapi dilema serius jika "Kesepakatan Abad Ini" benar-benar terjadi dalam perdamaian Israel-Palestina (Maayeh, 2019,p. 1-2).

Artikel penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu terhadap sikap Yordania yang konsisten terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Namun yang membedakannya adalah terletak pada unit eksplanasinya, dimana penelitian ini menjelaskan rencana Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina yang disebut kesepakatan abad ini. Sedangkan penelitian yang diangkat penulis adalah mengenai konsistensi kebijakan Yordania terhadap konflik Israel-Palestina dalam konteks solusi dua negara.

Keempat adalah penelitian yang berjudul "*Jordan's Options in the Wake of the Failure of the Two-State Solution*". Penelitian ini membicarakan munculnya opsi Yordania di tengah-tengah kegagalan solusi dua negara dalam perdamaian Israel-Palestina. Artikel ini memaparkan bahwa kegagalan paradigma dua negara akan memunculkan ancaman bagi keamanan nasional Yordania. Hal ini dikarenakan di tengah-tengah kegagalan paradigma tersebut, muncul kembali perdebatan lama yaitu argumen bahwa Israel akan mengorbankan Yordania. Orang-orang Yordania percaya bahwa Israel berusaha untuk menghidupkan kembali konsep opsi Yordania dalam mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, yang artinya akan mengecilkan setiap kesempatan bagi Palestina untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Tentu dalam hal ini Yordania tidak menginginkan hal tersebut karena akan berdampak pada keseimbangan demografis yang rumit di Yordania, yang ujungnya akan

membahayakan eksistensi kerajaan. Sehingga sama halnya dengan penelitian sebelumnya, dalam artikel ini Yordania tetap kekeh mengusung solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina (Barari, 2019).

Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat penulis, yaitu terletak pada anggapan Yordania bahwa solusi dua negara adalah jalan terbaik yang harus ditempuh pada saat ini dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah terletak pada pokok pembahasan, dimana penelitian ini mencoba memprediksi atau menjelaskan munculnya kembali opsi Yordania di tengah kegagalan paradigma solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Sedangkan penelitian yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan alasan konsistensi kebijakan Yordania terkait paradigma solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Kelima adalah penelitian yang berjudul *“The Two-State Solution: Is It Still Feasible?”*. Penelitian ini menyoroti kendala perdamaian antara Israel-Palestina dalam solusi dua negara. Di mana penelitian ini mengatakan bahwa kesepakatan solusi dua negara di antara kedua belah pihak mengalami kebuntuan abadi, hal ini dikarenakan adanya sikap yang saling bertentangan antara kedua belah pihak yang notabene menginginkan satu negara berdaulat di tanah yang sama. Selain itu, sikap Israel dalam perampasan tanah terus menerus yang membuat adanya saling ketidakpercayaan dan skeptis antara kedua belah pihak dan juga terdapat perpecahan internal dalam kubu Palestina yaitu antara Hamas dan Fatah yang jelas tidak membantu dalam berkompromi menyebabkan tidak adanya keputusan politik yang final. Sehingga penelitian ini menyimpulkan

bahwa keputusan politik dan perilaku negosiator antara keduanya telah menjadi hambatan utama dalam perdamaian kedua belah pihak (Tagliabue, 2014).

Tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis. Perbedaannya terletak pada tema dan topik yang diangkat dalam pembahasannya. Penelitian ini menyoroti penyebab kegagalan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, karena dipengaruhi adanya sikap saling bertentangan antara kedua belah pihak, sehingga solusi dua negara tidak pernah tercapai. Sedangkan dalam penelitian diangkat penulis lebih kepada menyoroti kebijakan Yordania tetap menawarkan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Akan tetapi, penelitian ini setidaknya memiliki persamaan yaitu terkait dengan objek penelitiannya yaitu dalam hal konflik Israel-Palestina dan solusi dua negara.

Terakhir adalah penelitian dalam "*The Jordanian-Israeli Relationship: The Reality of Cooperation*". Penelitian ini berfokus pada hubungan Yordania-Israel, dalam hal ini menyoroti manfaat yang bisa menyertai perdamaian hangat yang komprehensif di wilayah tersebut. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menjelaskan bahwa perdamaian yang dilakukan antara Yordania dan Israel tidak membawa dampak yang begitu signifikan di regional Timur Tengah. Meskipun mereka mengakhiri keadaan perang, membuka saluran diplomatik dan mencapai sejumlah kecil kerja sama ekonomi, itu tidak membawa harmonisasi ekonomi, budaya, sosial dan politik yang aktif yang menciptakan tingkat kerja sama dan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak. Kurangnya kepercayaan di kedua sisi adalah alasan utama mengapa perdamaian yang hangat belum terwujud, terutama terkait erat dengan konflik Israel-Palestina. Bagi orang Yordania dan orang Arab lainnya, keinginan untuk resolusi yang adil untuk

konflik Palestina akan selalu lebih besar daripada manfaat dari bekerja sama dengan Israel. Bagi Israel, masalah keamanan akan selalu mengalahkan potensi manfaat bekerja sama dengan negara-negara Arab. Tentu adanya perbedaan prioritas antara kedua sisi, akan selalu menghadapi rintangan dalam peningkatan kerja sama antara kedua belah pihak (Mitha, 2010, p. 124).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis, terletak pada fokus pembahasan yang diangkat. Penelitian ini fokus terhadap hubungan kerjasama antara Yordania dan Israel yang notabene masih jauh dari kata hangat. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini fokus pada kebijakan Yordania dalam konflik Israel-Palestina tentu terkait dengan solusi dua negara. Akan tetapi, penelitian ini setidaknya memberikan gambaran terhadap penulis, bahwa salah satu kendala menghalangi terjadinya perdamaian Timur Tengah adalah karena adanya saling ketidakpercayaan antara orang Arab dengan orang Yahudi.

Sehingga pada kesimpulannya, semua penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam hal konflik Israel-Palestina dan solusi dua negara, namun yang membedakan adalah mengenai unit eksplanasinya. Dalam hal ini, semua uraian di atas belum ditemukan karya yang secara khusus melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan yordania yang begitu konsisten terhadap solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pembahasan ini menurut penulis sangat penting dan menarik di kaji, mengingat Yordania merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina, bahkan negara ini memiliki sisi historis dan ikatan emosional yang begitu erat khususnya dengan orang-orang

Palestina, yang secara otomatis mau tidak mau Yordania harus terlibat dalam permasalahan ini.

Yordania senantiasa berperan aktif ikut serta dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina serta mendukung kemerdekaan Palestina. Tentu, dalam implementasinya ditunjukkan dengan sikap yang selama ini dimainkan oleh setiap rezimnya. Tapi pada dasarnya, dalam menyikapi permasalahan Israel-Palestina, Yordania masih diwarnai dengan ketidak konsistenan dan penuh dengan sikap politis, dalam hal ini terdapat dilema-dilema yang dilakukan Yordania baik sengaja maupun tidak disengaja, melakukan politik standar ganda agar kepentingan Yordania dan faktor-faktor aman yang diperlukan dalam stabilitas politik dalam negeri dan keamanan Timur Tengah secara Umum. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perpolitikan pada masa tersebut serta peran rezim sebagai aktor pengambil kebijakan.

### **1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan atau Model**

Untuk membantu mengkaji permasalahan dan mempermudah proses penelitian, diperlukan landasan konseptual untuk memperkuat analisis, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran. Pendekatan dan konsep dalam artian sederhana merupakan suatu cara untuk melihat, menyelesaikan, atau memecahkan dan menjelaskan suatu fenomena tertentu. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan (*Decision Making Theory*) Richard C. Snyder dan kawan-kawan. Di mana teori ini berupaya untuk menganalisis penyebab diambilnya keputusan luar negeri oleh para pembuat keputusan.

Sebagaimana diketahui *Decision Making* merupakan salah satu teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan oleh aktor-aktor internasional beserta hal-hal yang mempengaruhinya. Menurut Snyder sendiri kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari dua pertimbangan atau faktor yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Kedua pertimbangan tersebut yaitu; Pertama, struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (*Internal Setting*) dan sistem internasional (*Eksternal Setting*) (Snyder, Bruck, Safin, 2002, p. 60).

Snyder menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Peran kepemimpinan, persepsi, arus informasi yang didapat, dampak dari kebijakan luar negeri serta sistem kepercayaan para pembuat keputusan merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh suatu negara. Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya, apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis ataupun beresiko (Perwita & Yani, 2005, p. 64).

Teori Richard C. Snyder menyatakan bahwa faktor-faktor Internal dan eksternal setting memiliki posisi yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam pembuatan sebuah keputusan luar negeri. Pada faktor internal, kondisi politik suatu negara sangat menentukan produk kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat kebijakan suatu negara. Kondisi politik tersebut tercipta karena adanya interaksi antara pengambil kebijakan dengan aktor-aktor politik



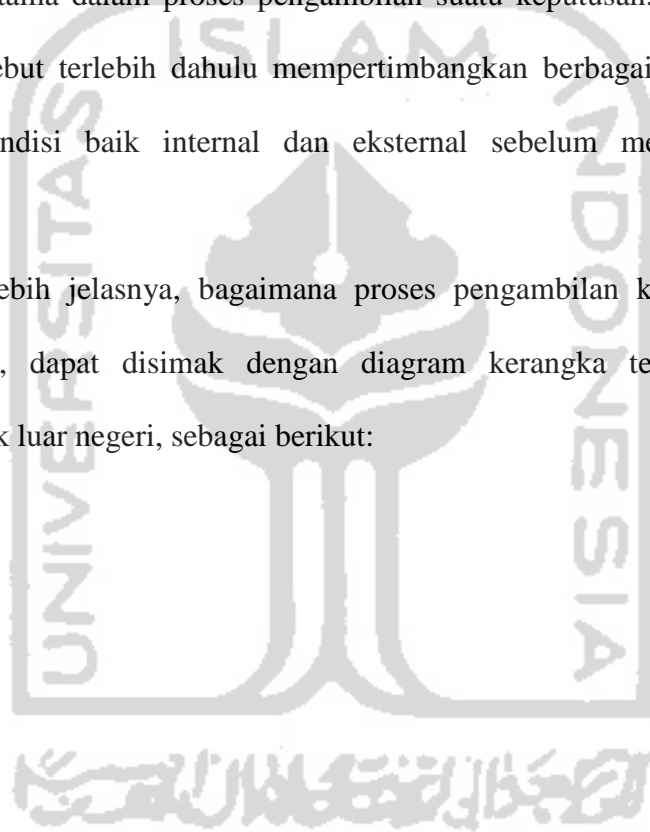
kepentingan “*policy influencer*” yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Situasi dan kondisi tersebut memberikan arah atau pedoman terhadap cara-cara masyarakat dalam berfungsi dan diorganisasikan dalam sebuah negara. Sedangkan pada faktor eksternal, adalah faktor kondisi yang ada di luar wilayah teritorial negara, artinya negara harus mempertimbangkan kondisi lingkungan internasionalnya sebelum mengambil keputusan luar negeri (Snyder, et al., 2002, p. 60-61).

Kedua faktor ini masing-masing memiliki unsur yang mempengaruhinya. Pada faktor internal unsur yang mempengaruhi antara lain, *Non Human Environment, Society* dan *Human Environment*. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu *Non Human Environment, Other Society, Other Cultures* dan *Societies Organized*. Tentu di setiap masing unsur tersebut memiliki variabel yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Pada intinya faktor internal mengacu pada kondisi domestik dalam negeri, seperti letak geografi, masyarakat, sumber daya alam, organisasi pemerintahan dan non pemerintahan, parpol, media, opini publik serta kebudayaan. Sedangkan faktor eksternal mengacu pada kondisi batas-batas teritorial, seperti geopolitik, wilayah perbatasan, negara lain, masyarakat luar, budaya luar, organisasi internasional baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Namun, di sini Snyder sendiri tidak menuntut bahwa semua unsur yang ada baik di dalam internal dan eksternal dimasukkan secara utuh menjadi satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam menganalisis perilaku sebuah negara, melainkan Snyder sendiri lebih menekankan pada aspek internal dan eksternal sebagai variabel utama. Artinya latar internal dan eksternal terus

berubah dan akan terdiri dari apa yang penting bagi pembuat keputusan, yaitu pada bagaimana mereka bereaksi terhadap berbagai rangsangan.

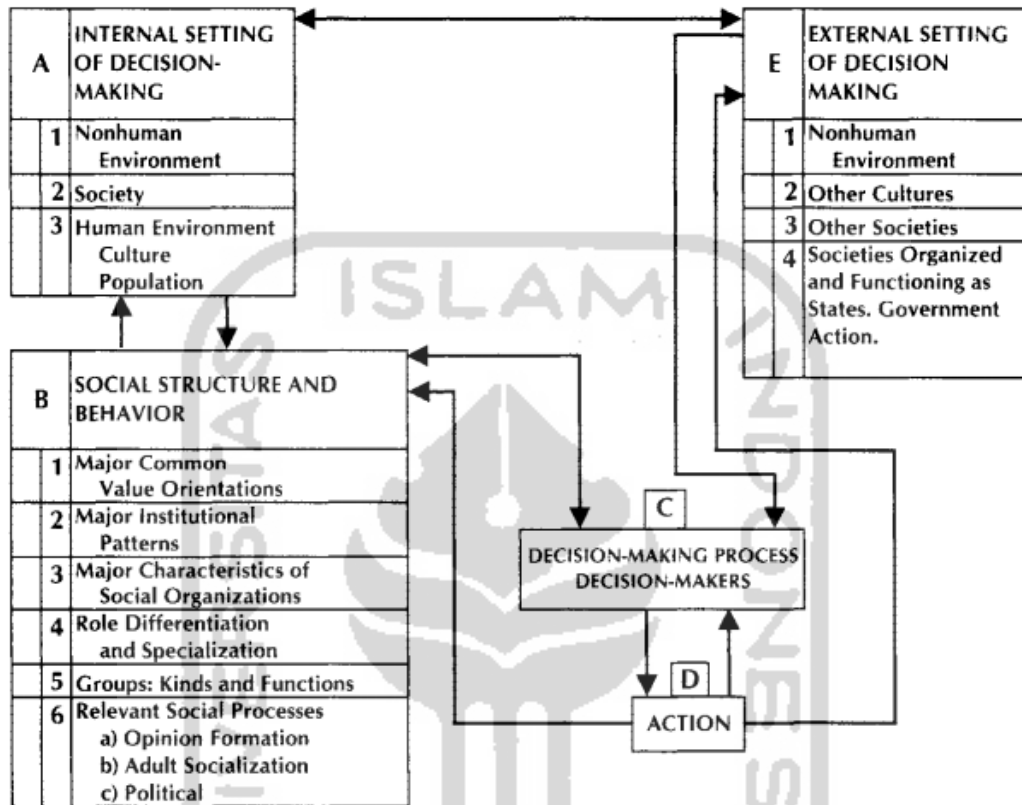
Sehingga, asumsi dasar dalam perspektif *decision making* Richard Snyder adalah sekumpulan tindakan internasional yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pelaku politik domestik, dalam hal ini pemimpin negara baik secara individu maupun kelompok bertindak sebagai aktor utama dalam proses pengambilan suatu keputusan. Dalam hal ini para aktor tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai macam faktor situasi dan kondisi baik internal dan eksternal sebelum mengambil sebuah keputusan.

Untuk lebih jelasnya, bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil, dapat disimak dengan diagram kerangka teori pembuatan kebijakan politik luar negeri, sebagai berikut:



Gambar 1.

Kerangka *Decision Making* oleh Richard Snyder



Sumber: Snyder, R. C., Bruck, H., & Sapin, B. (2002). *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Palgrave Macmillan.

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana skema proses pengambilan keputusan luar negeri menurut Richard Snyder. Skema ini memperlihatkan adanya faktor-faktor yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini tidak bisa dipisahkan dan memiliki posisi yang sama saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis hendak mencoba menganalisis mengapa kebijakan Yordania tetap konsisten menawarkan solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Dalam hal ini, penulis melihat adanya keadaan domestik atau faktor internal di Yordania, yaitu banyaknya kritikan dilontarkan terhadap gejolak Israel dengan Palestina menjadi penyebab utama yang mempengaruhi posisinya dalam mengambil keputusan luar negerinya, yaitu tetap konsisten mengukung konsep solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Selain itu, banyaknya berbagai tekanan dan kritikan dari berbagai macam kelompok kepentingan terhadap dampak gejolak Israel-Palestina bagi Yordania khususnya dalam menyikapi para pengungsi juga menjadi bagian dari warna perpolitikan diplomasi dari negara ini dalam mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Banyaknya pengungsi akibat konflik Israel-Palestina berdampak pada ancaman stabilitas Yordania itu sendiri, baik dari krisis identitas nasional, ekonomi maupun politik. Untuk menangkal ancaman stabilitas tersebut, Yordania berupaya memangkas banyaknya para pengungsi yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Yordania, termasuk bagi para pengungsi Palestina dengan dalih memperjuangkan hak-hak mereka untuk kembali lagi menempati tempat tinggal mereka di Palestina. Sehingga dalam hal ini, Yordania tetap mengupayakan solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina, guna terpenuhinya hak-hak pengungsi serta tercapainya kepentingan.

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adalah keadaan yang terjadi di lingkup internasionalnya atau faktor eksternal. Pada faktor ini, aktor-aktor internasional menjadi penyebab utama yang mendorong Yordania tetap konsisten

mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina. Salah satu contoh ringkas adalah adanya wacana yang berkembang di Timur Tengah khususnya oleh para ekstrimis Israel dan sekutunya yaitu AS, bahwa Yordania akan menjadi salah satu opsi negara atau tanah air pengganti “*al-Watan al-Badil*” bagi warga Palestina atau dalam redaksi yang sering di dengar adalah “*Jordan is Palestine*”. Wacana perdebatan politik ini selalu menimbulkan ketakutan bagi kepemimpinan kerajaan Hashemite Yordania, terlebih populasi negara ini dua pertiga dari rakyatnya merupakan warga negara yang notabene dari Palestina. Hal ini memperlihatkan Yordania menganggap Israel dan sekutunya AS sebagai ancaman bagi eksistensi kerajaan, terlepas dari kedekatannya dengan Israel dan Amerika Serikat

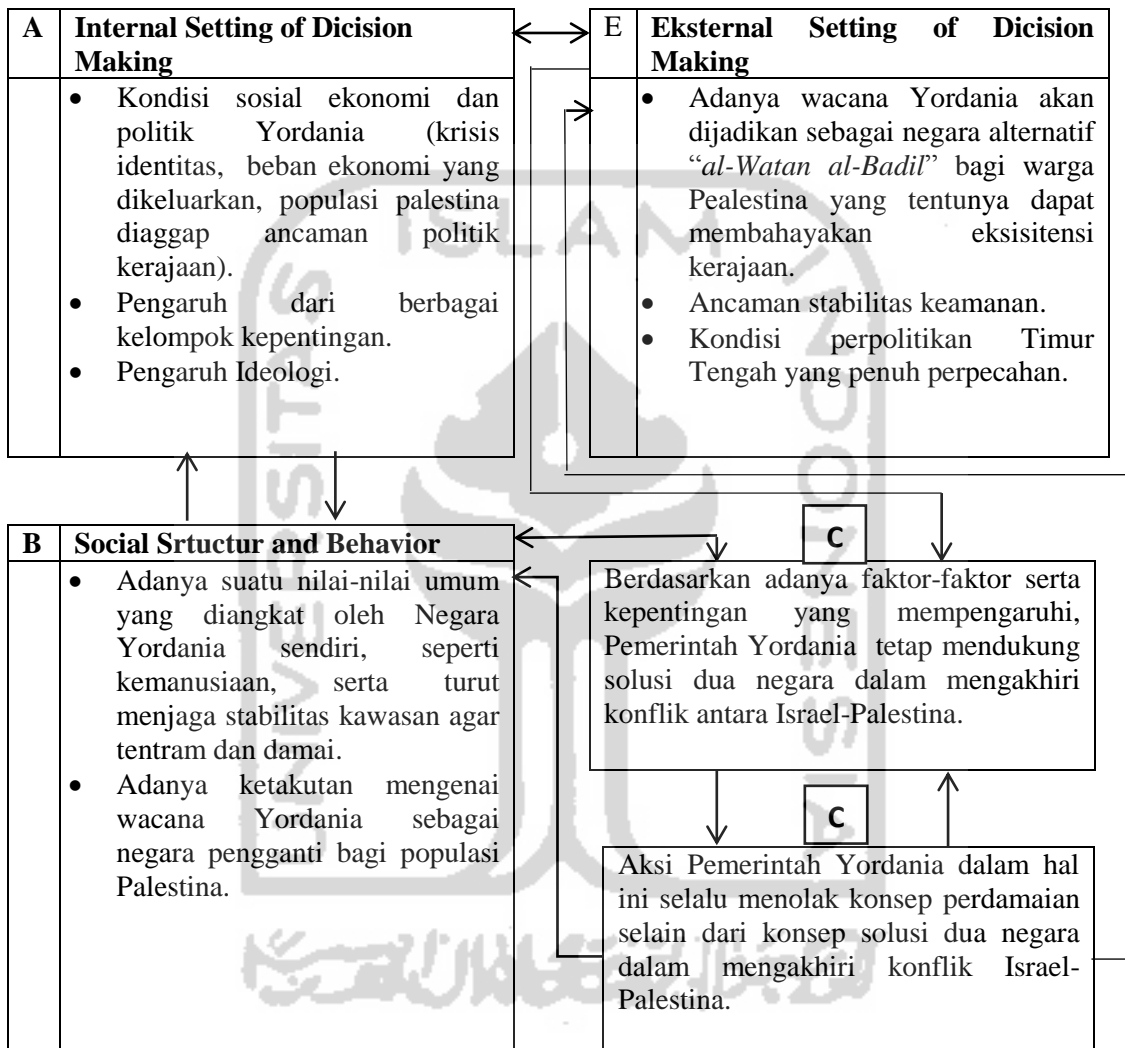
Sehingga dalam konteks kaitan penelitian ini dengan konsiderasi pengambilan keputusan (*Decision Making*) menurut Richard C. Snyder yang sudah dijelaskan di atas. Maka penelitian ini hendak mencoba mengambil kedua konsiderasi tersebut, dalam hal ini aspek pertimbangan yang mempengaruhi Yordania tetap konsisten mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina, yaitu aspek politik dalam negeri Yordania serta kondisi domestiknya yang dikategorikan sebagai (*Internal Setting*) serta keadaan internasional atau (*Eksternal Setting*).

Oleh karenanya, bagan teori Richard Snyder tersebut dapat diaplikasikan kepada suatu proses pembuatan kebijakan luar negeri Yordania dalam konflik Israel-Palestina khususnya dalam kebijakan Yordania yang tetap konsisten mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik tersebut dapat dilihat dibawah ini.

**Gambar 2.**

Penerapan Teori Decision Making Richard Snyder Dalam Kebijakan Yordania

Tetap Mendukung Solusi Dua Negara



Sumber: *Diolah sendiri oleh Penulis*

## **1.8 Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dalam bentuk metode pendekatan kualitatif. Menurut Blaxter metode kualitatif yaitu metode menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dinamika dan/atau fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian. Di samping itu, metode ini lebih bersifat fleksibel untuk mendapatkan data-data yang dirasa perlu untuk mencapai kepada sebuah kesimpulan yang menjadi fokus dalam penelitian.

Selain itu proses analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif untuk mencapai tujuan pertama dan analisis-kritis untuk tujuan kedua. Metode deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Analisis deskriptif diperkuat dengan metode analisis-kritis yaitu untuk mengungkapkan motif ideologis, kepentingan dalam hal ini Yordan sebagai objek dalam penelitian ini.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah negara Yordania terutama dalam melihat kebijakan, posisi serta sikap yang dimainkan Yordania di perpolitikan Timur Tengah khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Dimana

konflik kedua blok ini dari dulu hingga sekarang masih mewarnai regional Timur Tengah dan belum menemukan titik temu perdamaian di antara keduanya.

### **Metode Pengumpul Data**

Metode/alat/teknik adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode kualitatif dalam pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dan literatur (*Library Research*), yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan konteks penelitian serta bersifat faktual berupa buku, jurnal ilmiah, koran, dokumen, media televisi, internet, yang dianggap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan penelitian dalam kerangka penelitian yang benar. Hasil dari studi pustaka yang diperoleh tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisa secara interpretatif menggunakan teori yang telah dituangkan dalam penelitian ini, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil analisa tersebut kemudian dituliskan dalam skripsi sebagai hasil dari penelitian yang elaboratif.

### **Proses Penelitian**

Proses penelitian sangat penting yang menyangkut perencanaan atau langkah dalam melakukan riset. Proses penelitian ini dimulai dari pra riset sampai mendapatkan data yang selanjutnya dianalisis dan kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian. Pentingnya prosedur ini sebagai panduan penulis dalam rangka mempermudah proses penelitian. Adapun penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa langkah proses:



### 1. Pra Riset

Kegiatan pra riset ini mencakup persiapan sebelum melakukan penelitian. Ini termasuk melihat hasil laporan atau penelitian terdahulu, membaca bahan bacaan yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat.

### 2. Pengambilan Data

Penelitian ini akan mendapatkan data dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari laporan Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Yordania atas masalah yang diangkat dan tentunya yang sudah dipublikasikan atas nama instansi terkait. Sumber sekunder akan dipilih dari media tertulis, mencakup dengan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, tulisan-tulisan dari berbagai pihak dan instansi yang tersebar dalam bentuk surat kabar, majalah, makalah, dokumen dan bahan bacaan yang memungkinkan dan tentunya berkaitan dengan topik yang peneliti angkat.

### 3. Analisis Data

Tahap penting berikutnya adalah mengevaluasi data yang sudah dikumpulkan dan dianalisa secara interpretatif menggunakan teori yang telah dituangkan dalam penelitian ini, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Setelah melewati beberapa proses tersebut, hasil analisa data yang dipandang sesuai dengan kebutuhan peneliti tersebut kemudian selanjutnya akan dituliskan dalam skripsi sebagai hasil dari penelitian yang elaboratif, dan tidak

lupa untuk mencantumkan referensi apabila mengutip dari sumber-sumber tertentu.



**BAB II :**  
**PARADIGMA SOLUSI DUA NEGARA DAN HAL-HAL YANG**  
**MEMPENGARUHI KEBIJAKAN YORDANIA TETAP KONSISTEN**  
**MENDUKUNG SOLUSI DUA NEGARA DARI ASPEK *INTERNAL***  
***SETTING***

**2.1 Paradigma Solusi Dua Negara**

Paradigma solusi dua negara di tengah konflik Israel-Palestina bukanlah suatu hal yang baru, melainkan paradigma ini sudah lama berkembang bahkan mulai sejak konflik antara Israel-Palestina ini muncul. Sebagaimana yang diketahui kemunculan paradigma ini tidak terlepas dari keinginan komunitas internasional yaitu PBB yang menginginkan konflik antara kedua blok ini mereda. Resolusi partisi yang dikeluarkan PBB tahun 1947, merujuk pada pembagian tanah Palestina, membuat komunitas internasional dan para perwakilan yang terlibat dalam konflik serta opini rakyat kedua belah pihak telah mengadopsi paradigma ini sebagai pilihan-pilihan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Alhasil paradigma solusi dua negara dituangkan ke dalam perjanjian Oslo Pada tahun 1993. Dalam perjanjian Oslo, Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyepakati rencana untuk mengimplementasikan solusi dua negara sebagai bagian dari kesepakatan Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Palestina (PA) (Britannica.com, 2020). Kesepakatan tersebut memberikan kesempatan pada PLO untuk memikul tanggung jawab pemerintahan secara terbatas di Tepi Barat dan Gaza serta menyerukan Israel untuk menarik pasukanya dari beberapa bagian wilayah pendudukan. PLO dalam hal ini

mengakui Israel begitupun juga sebaliknya Israel mengakui PLO secara resmi sebagai entitas pemerintahan yang sah untuk Palestina.

Proses kemajuan awal tersebut tidak bertahan begitu lama disebabkan adanya kombinasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan dan keterlambatan proses ini, bahkan Israel dan perjuangan Palestina lainnya menolak perjanjian tersebut. Ariel Sharon tokoh sayap kanan Israel memandangnya sebagai “bunuh diri nasional” dan mendesak semua orang Israel untuk menentang premis dasarnya tersebut. Sedangkan di pihak Palestina yang terdiri dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina (DFLP), HAMAS, dan Jihad Islam, menganggap perjanjian tersebut sebagai pengakuan Israel terhadap PLO tanpa timbal balik kepada negara Palestina atau persetujuan bagi Israel untuk menarik diri dari tanah mereka (Charter, 2010, p. 60).

Lintasan peristiwa saat ini juga merusak solusi dua negara dengan melemahkan kubu perdamaian masing-masing dan menciptakan fakta-fakta yang sulit untuk dibalikkan, terutama perluasan pemukiman oleh Israel dan fragmentasi struktur pemerintahan Palestina. Sehingga sampai sekarang paradigma dua negara ini tidak pernah terwujud, malahan paradigma ini semakin redup ditandakan dengan dukungan dari publik kedua belah pihak semakin berkurang. Dalam jajak pendapat yang dilakukan *Palestinian Center for Policy and Survey Research* (PCPSR), pada Desember 2014, terdapat 51 persen orang Palestina menolak penyelesaian dua negara. Begitupun juga pada hasil survei Desember 2015, meningkat yaitu hampir 54 persen menolak. Tren yang sama juga terlihat pada populasi Israel, di mana pada tahun 2015, terdapat 51 persen orang Israel

mendukung solusi dua negara, dukungan ini tentunya menurun, di mana pada tahun sebelumnya terdapat 62 persen mendukung solusi dua negara (PCPSR, 2015). Tentu ini menandakan bahwa paradigma dua negara sudah tidak realistis untuk disajikan lagi sebagai jalan keluar dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Kendati demikian, tren solusi dua negara sampai sekarang masih memiliki dukungan dari komunitas internasional dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya, salah satunya adalah Yordania. Kedekatan geografis membuat Yordania tidak bisa bebas dari dampak potensial dari konflik Israel-Palestina. Sehingga Yordania selalu menganggap isu Palestina ini sebagai bagian masalah dalam rumah tangganya. Kedekatan tersebut memberikan dampak secara tidak langsung terhadap negara ini untuk memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara Israel-Palestina. Peran penting tersebut dilakukan Yordania bukan tanpa alasan melainkan kuatnya dukungan rakyat Yordania terhadap Palestina yang selalu menginginkan Palestina berdiri tegak menjadi sebuah negara.

Meskipun pada sebelumnya, Yordania merasakan kekecewaan terhadap PLO yang secara diam-diam melakukan negosiasi rahasia dengan Israel dalam kesepakatan Oslo tanpa memberitahu Yordania. Namun, Yordania tidak menghentikan dukungan dan upaya mereka di semua lini baik di lingkup regional maupun internasional, mungkin ini dilakukan untuk menyoroti penderitaan rakyat Palestina dan alasan mereka yang membutuhkan penyelesaian yang adil, komprehensif dan permanen. Lebih-lebih terhadap solusi dua negara, Yordania selalu mendukung paradigma ini untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Yordania menganggap tidak ada satu-satunya jalan yang pantas untuk menyelesaikan konflik ini, melainkan kembali lagi melirik solusi dua negara sebagai solusi terbaik dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.

## 2.2 Yordania Dan Solusi Dua Negara

Dukungan Yordania terhadap perdamaian konflik Israel-Palestina atas dasar solusi dua negara merupakan sebuah dukungan yang tidak bisa dipandang begitu saja. Dukungan ini muncul karena adanya ikatan emosional dan sisi historis yang kuat khususnya antara Yordania dan Palestina. Keterkaitan Yordania dalam konflik Israel-Palestina tidak bisa lepas dari keterlibatannya raja pertama Yordania yaitu raja Abdullah I, yang pada saat itu menganggap kurangnya perlawanan dari bangsa Arab terhadap invasi Zionis Israel terhadap tanah Palestina. Abdullah I mengatakan:

“Since the people Palestine have confined themselves to making protests, I have considered it my duty under my religion according to which I worship God and as something enjoined upon me by my racial affiliation, to strive to ward off the calamity by bringing about the union of Palestine and Transjordan” (King Abdullah, 1978, p. 98).

Kedatangan raja Abdullah ke tanah Palestina pada saat itu membawa visi yaitu mempromosikan kebijakan Suriah Raya “*Greater Syria*”, di mana ia akan menjadi penguasa wilayah asli Suriah, yang meliputi entitas Suriah, Libanon, Transyordan, dan Palestina (Jarbawi, 1995, p. 95). Namun tujuan utama Abdullah bukanlah menjadi Emir tetapi untuk menyatukan tanah Arab di bawah bendera Hashemite. Akan tetapi impian tersebut tidak mudah terjadi, ketika Pangeran Abdullah menyadari ketidakmungkinan mencapai impian Suriah yang lebih besar, ia mengarahkan pandangannya pada Palestina, di mana ia mempertahankan

kontak langsung dengan para pemimpinnya. Alih-alih mencapai kepentingannya, Abdullah melakukan negosiasi secara diam-diam dengan Zionis Israel untuk membagi wilayah palestina menjadi dua bagian. Namun, usahanya tersebut mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak, seperti Inggris, Mesir, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan nasionalis Arab Palestina (Nasur et al, 2012, p. 3). Meskipun pada akhirnya, Yordania berhasil menganeksasi Tepi Barat pada tahun 1950 sebagai bagian dari wilayah kerajaan Hashemite.

Keberhasilan Yordania menganeksasi Tepi Barat tidak bertahan lama. Perang enam hari pada tahun 1967 yang dimenangi Israel, membuat Yordania kehilangan atas Tepi Barat. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat Yordania untuk mendapatkannya kembali. Raja Hussein pada saat itu satu-satunya dari pemimpin Arab, percaya bahwa adalah mungkin untuk mendapatkan kembali Tepi Barat dengan cara damai (Michalak, 2012, p. 113).

Meskipun demikian, tantangan ambisi besar Yordania untuk memasukan wilayah Palestina sebagai bagian dari Hashemite tidak berhenti begitu saja. Kebangkitan nasionalis Palestina setelah perang 1967, dalam hal ini PLO memberikan dampak besar dalam kerangka pemikiran kebijakan Yordania dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Terbukti, Yordania berbeda dari PLO setidaknya dalam dua hal. Pertama, strategi Yordan dalam memulihkan tanah yang hilang didasarkan pada diplomasi dan bekerja dengan komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel. Di sisi lain, PLO menggunakan taktik gerilya, yang membawa malapetaka ke infrastruktur Yordania yang harus menanggung pembalasan Israel yang keras. Perbedaan kedua antara Yordan dan PLO adalah tujuan akhir mereka. Yordan ingin kembali pada

pemukiman yang akan menjamin pemulihan tanah yang hilang pada tahun 1967, Sementara PLO berusaha untuk memobilisasi segala cara yang mungkin untuk membebaskan seluruh tanah Palestina (Barari, 2008, p. 233).

Perbedaan ini membuat keduanya saling bertikai satu dengan lain, terlebih ditambah dengan adanya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Puncaknya pada tahun 1970-71, yang dikenal dengan Black September. PLO yang pada saat itu diberikan kebebasan di Yordania, malah melakukan pergerakan untuk menentang kerajaan (Alshoubaki & Harris, 2018, p. 156). Peristiwa tersebut langsung direspon oleh raja Hussein dengan menghancurkan infrastruktur PLO, dan mengusir para operasinya keluar dari tanah Yordania. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa Hussein tidak bisa mentolerir irredentisme Palestina dalam otonomi kerajaannya (Tal, 1993, p. 169).

Semenjak peristiwa tersebut dan diikuti dengan pengakuan PLO pada KTT Rabat 1974, sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, menyebabkan terjadinya transformasi dalam sifat perjuangan Yordania terhadap konflik Israel-Palestina. Pengakuan PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah Palestina semakin menyudutkan peran Yordania, terlebih pada Desember 1987, Intifada pertama meletus yang semakin mengebiri pengaruh Yordania di Tepi Barat (Barari, 2008, p. 234). Di sisi lain, gerakan Zionisme membuat rezim dan negara berada di tanah yang goyah, terutama setelah 1977, ketika partai Likud yang revisionis berkuasa di Israel dengan konsep yang mereka bawa "*Jordan is Palestine*" (Jarbawi, 1995, p. 95). Slogan Likud semakin menggoyahkan posisi Yordania, terlebih slogan Likud tersebut semakin membuat Yordan cemas karena anggapan liar Israel mengenai tanah Yordan sebagai tanah alternatif untuk orang Palestine.



Terhadap latar belakang ini, Raja Hussein yang pada saat itu memegang tampuk kepemimpinan mengubah orientasi kebijakan luar negeri Yordania yang pada awalnya berkeinginan untuk menyatukan negara-negara Arab di bawah kontrol kerajaan terutama tanah Palestina, telah mengalami perubahan mendasar yakni mendukung dan memperjuangkan hak independen PA di Tepi Barat. Yordania dalam hal ini beralih ke strategi preventif untuk melindungi kepentingan vitalnya, serta melepaskan diri secara administratif dan legal dari Tepi Barat pada tahun 1988 (Barari, 2008, p. 234).

Sejak pelepasan Tepi Barat Yordania terus mendukung hak konstitusional orang-orang Palestina untuk mendirikan negara di tanah Palestin berdasarkan solusi dua negara. Dukungan ini tidak pernah berubah meskipun kendali tampuk kepemimpinan di Yordania sendiri beralih ke tangan Raja Abdullah II. Dalam masalah politik luar negeri, Abdullah banyak mengikuti kebijakan ayahnya Hussein, apalagi mengenai kebijakan Yordania dalam menghadapi konflik Israel-Palestina. Abdullah tidak menyebabkan adanya perubahan mendasar, Abdullah menjadikannya sebagai bentuk prioritas kepentingan Yordan dalam masalah politik luar negeri (Nasur et al, 2012, p. 9). Ia secara terus menerus menunjukkan komitmennya pada proses perdamaian dengan berpartisipasi dalam negosiasi untuk solusi dua negara, bertemu dengan para pemimpin kedua belah pihak dalam hal ini Pemimpin Israel-Palestina dan sama dengan ayahnya selalu meminta perhatian internasional untuk masalah ini.

Selama kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat misalnya, Abdullah menekankan bahwa Yordan tetap diperlukan sebagai titik tumpu bagi stabilitas masa depan kawasan (Nasur et al, 2012, p. 10). Sementara itu, Abdullah berusaha

mengembalikan proses perdamaian ke jalur yang benar setelah banyaknya kegagalan kolektif antara Israel dan pihak-pihak terkait. Ia memiliki minat vital dalam solusi abadi dan saling dapat diterima antara satu dengan yang lainnya. Abdullah mengatakan bahwa “masalah inti di wilayah ini adalah masalah Israel-Palestina. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak frustrasi, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk jika kita tidak menyelesaikan masalah. Kami berusaha untuk mendapatkan Israel dan Palestina kembali ke meja” (Abdullah II, 2010). Dalam hal ini Abdullah percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah solusi dua negara merupakan solusi akhir yang harus ditempuh yang akan memberi orang Israel dan Palestina kemampuan untuk hidup bersama.

### **2.3 Upaya Yordania Terhadap Solusi Dua Negara Sebagai Solusi Akhir**

Kebijakan Yordania dalam mengakhiri perdamaian Israel-Palestina tidak berhenti dalam solusi dua negara, melainkan terdapat berbagai upaya yang dilakukan sebagai bentuk bukti nyata dalam mengakhiri konflik yang ada di Timur Tengah. Peran penting Yordania dalam pencarian perdamaian komprehensif di Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir ini, didasarkan pada keyakinan Amman bahwa masalah Palestina adalah inti dari konflik Arab-Israel dan Palestina harus bernegosiasi untuk diri mereka sendiri dalam mencapai masa depan mereka (Nytimes.com, 1993).

Sejak Camp David, Raja Yordania yaitu King Hussein terus-menerus menyerukan konferensi internasional untuk melibatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan para pihak dalam konflik dengan tujuan mengamankan penyelesaian yang komprehensif dan langgeng untuk konflik Arab-Israel (Madfai, 1993, p. 12), tetapi upaya tersebut jauh dari kata berhasil. Namun, Yordania tidak

menyerah begitu saja dan tetap mengupayakan adanya perdamaian dalam mengakhiri konflik tersebut.

Dukungan yang diberikan Yordania pada Palestina dalam proses perdamaian di Madrid pada oktober 1991, menjadi awal dimulainya negosiasi antara negara Arab dan Israel. Yordania pada saat itu memberikan payung hukum bagi delegasi Palestina serta mendukung penuh Palestina dalam upaya mereka meraih pengakuan dan hak-hak politik nasional mereka. Israel dan sekutunya Amerika pada saat itu menolak adanya delegasi terpisah dan menginginkan adanya delegasi gabungan antara Yordania-Palestina dalam proses perdamaian tersebut. Kondisi ini terutama ditujukan pada keengganan Israel untuk berbicara dengan anggota PLO. Hal ini terbukti ketika Palestina beroperasi menjadi delegasi yang terpisah, laporan ketidakpuasan semakin disuarakan karena kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak (Brand, 1995, p. 56).

Kendati demikian tidak bisa dipungkiri, bahwa keberhasilan terbesar Yordania dalam konferensi Madrid adalah mempromosikan penerimaan internasional atas posisi negosiasi Palestina yang independen (Tal, 1993, p. 170). Meskipun dalam hal ini, tidak banyak capaian yang dicapai ke arah perdamaian yang komprehensif, akan tetapi konferensi tersebut setidaknya membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan antara Israel dan negara Arab.

Negosiasi berlanjut sampai pertengahan Agustus 1993, di mana Israel dan PLO melakukan pembicaraan rahasia di Oslo, Norwegia. Perjanjian Oslo antara Israel-PLO menghasilkan kesepakatan Deklarasi Prinsip (DoF) yang salah satu isinya adalah Israel mengakui PLO dan berkomitmen untuk menciptakan otonomi teritorial Palestina (Frisch, 2004, p. 54). Selain itu, perjanjian tersebut

menyerukan saling koordinasi dan kerjasama ekonomi antara Israel dan Palestina (Almomani, 2012, p. 502). Kondisi ini membuat Yordania marah. Yordania menganggap ia telah dikhianati oleh rekannya sendiri yaitu Palestina karena tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Namun pada dasarnya kemarahan Yordania pada saat itu mengarah pada Israel dan terutama terhadap Shimon Peres, arsitek dari proses Oslo. Raja menganggap Peres sebagai pencari publisitas, bukan pemikir strategis. Oslo menghindari masalah-masalah sulit dan penuh dengan kontradiksi. Peres telah melupakan kepentingan Yordan, sang Raja percaya, dan dia tidak lagi bisa dipercaya (Riedel, 2018).

Alhasil melihat adanya kesepakatan antara Israel-PLO, Raja Hussein pada saat itu langsung bergegas menjamu Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di Aqaba di istana kerajaan untuk menyetujui format negosiasi yang memberikan dasar untuk menyelesaikan 45 tahun permusuhan antara kedua negara (Tal, 1993, p. 52). Kerajaan berkeinginan untuk meresmikan perjanjian damai antara Israel-Yordania secepat mungkin untuk mengatasi entitas Palestina yang baru terbentuk tersebut. Sehingga pada tahun 1994 Yordania dan Israel menandatangani perjanjian damai, dan memberikan Yordania hak istimewa dalam pengelolaan tempat suci umat Muslim di Yerusalem (Abudayeh, 1995, p. 36).

Berbagai dinamika dan perdamaian tak kunjung diraih, Yordania tak henti menyerukan upaya intensif untuk menemukan solusi yang adil dalam menyudahi konflik berkepanjangan ini. Ini dibuktikan dengan upaya yang dilakukan Yordania yang hingga sekarang tidak pernah berhenti mempromosikan solusi dua negara sebagai solusi akhir dalam konflik. Yordania telah berperan aktif dalam menciptakan momentum dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam Inisiatif

Perdamaian Arab (API) pada tahun 2002 misalnya, Yordania telah berkontribusi dan secara agresif mempromosikan formulasi API ke dalam perdamaian Israel-Palestina (Barari, 2009, p. 25).

Meskipun inisiatif API diprakarsai oleh Raja Abdullah putra mahkota Arab Saudi, Namun pada dasarnya, inisiatif API ini merupakan lanjutan dari upaya Yordania yang pada saat itu melihat adanya kematian dalam proses perdamaian antara Israel dan negara Arab. Marwan al-Muasher menteri luar negeri Yordania mengatakan, bahwa ide ini sebenarnya pertama kali dituangkan secara pribadi oleh Yordania. Raja Yordania Abdullah II pada saat itu menulis surat yang ditujukan kepada presiden AS George W. Bush pada 8 September 2001, yang menyatakan bahwa pendekatan inkremental untuk pembuatan perdamaian telah menemui jalan buntu dan Yordania mengusulkan perdamaian komprehensif yang melibatkan jaminan keamanan untuk Israel dari semua negara Arab (Weitzman, 2010, p. 5).

Yordania yang merasa kepemimpinannya terlalu kecil dan hanya bisa memerankan peran pendukung dalam pencarian solusi akhir, maka Yordania dengan legowonya menerima keputusan Arab Saudi yang saat itu mengambil alih inisiatif API ini, sehingga pada Maret 2002 KTT liga Arab dengan secara bulat menyepakati inisiatif tersebut, yang isinya menawarkan Israel untuk mengakhiri konflik Arab-Israel, bersamaan dengan perdamaian komprehensif dan hubungan normal. Sebagai gantinya, Israel harus mengakhiri pendudukannya di Tepi Barat pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza yang didasarkan pada implementasi Resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB, yaitu menerima negara Palestina yang merdeka di wilayah-wilayah tersebut dan Yerusalem Timur

sebagai ibukotanya, serta menerima solusi yang adil untuk masalah pengungsi Palestina (Meckelberg & Shapland, 2019, p. 3).

Upaya Yordania tidak berhenti sampai di sini. Pada saat yang berbeda, Yordania menjalin kerjasama dengan pemerintahan George W. Bush dalam mengembangkan gagasan Peta Jalan Damai (*Road Map*) untuk mengimplementasikan visi presiden As tentang solusi dua negara. Yordan menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak di Aqaba, dalam rangka meluncurkan negosiasi perdamaian berdasarkan “Peta Jalan” yang disusun Amerika. Banyak pejabat beranggapan bahwa pertemuan Raja dengan Bush pada 1 Agustus 2002 menyebabkan presiden mengadopsi rencana tersebut (Barari, 2009, p. 26). Untuk terus menekan rencana tersebut, Yordania kembali menegaskan pada pidato sesi gabungan kongres pada Maret 2007. Diplomasi Yordania telah difokuskan pada peran Amerika dalam kemungkinan penyelesaian perdamaian, Dalam hal ini, Abdullah II membuat permohonan yang kuat terhadap Amerika untuk memimpin dalam mengejar perdamaian Israel-Palestina, serta menghimbau anggota kongres Amerika untuk membantu menerapkan solusi dua negara sesuai dengan peta jalan dan inisiatif perdamaian Arab.

Namun, lagi-lagi semua upaya resolusi konflik tersebut belum menampakkan tanda-tanda akan terjadinya proses perdamaian antara Israel dan Palestina, bahkan konflik tersebut menjadi konflik yang cukup akut dan menyita perhatian masyarakat internasional. Amerika sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dan memiliki kepentingan strategis terhadap pendirian negara Palestina, juga gagal tidak berhasil mengakhiri konflik tersebut, dengan melakukan tekanan pada Israel untuk berkomitmen pada pendirian negara

Palestina (Nasur, 2014, p. 70). Semua itu menyisakan pertanyaan pesimis, apalagi setelah Donald Trump mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibukota Israel (Landler, 2017). pernyataan ini semakin memperkuat tesis tentang konflik abadi antara Israel-Palestina di benak komunitas internasional.

Pernyataan yang dikeluarkan Trump tersebut memperjelas bahwa harapan solusi dua negara sebagai solusi akhir antara Israel-Palestina sudah mengalami kematian yang mengenaskan. Tentu pernyataan tersebut menuai berbagai macam kritikan khususnya dari negara Arab. Yordania dalam hal ini, melalui juru bicara pemerintah menganggap bahwa keputusan Trump tersebut tidak sah secara hukum. Juru bicara itu mengutip resolusi Dewan Keamanan PBB 1980, yang menyatakan bahwa setiap tindakan Israel yang “telah mengubah atau menyatakan untuk mengubah karakter dan status” Yerusalem merupakan penghalang serius untuk mencapai perdamaian komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah (Dwyer, 2017).

Dalam hal ini, Yordania menekankan bahwa perlunya Amerika Serikat untuk menekankan perannya sebagai perantara netral untuk menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara, yang telah disepakati dunia adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian yang komprehensif.

#### **2.4 Faktor *Internal Setting* Mempengaruhi Kebijakan Yordania Tetap Konsisten Mendukung Solusi Dua Negara**

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekonsistenan Yordania dalam mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina, adalah tidak jauh dari kepentingan nasional Yordania itu sendiri. Sehingga untuk mempertahankan kepentingan tersebut, Yordania atau pun aktor-aktor internasional lainnya dituntut

terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek dominan sebelum mengambil suatu kebijakan. Maka dari itu dalam mengambil sebuah kebijakan terdapat berbagai macam proses pengambilan suatu kebijakan yang harus dipertimbangkan suatu negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab I tepatnya pada bagian kerangka konseptual. Richard Snyder dan kawan-kawan, telah membagi proses bagaimana serangkaian pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan oleh aktor-aktor internasional beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Snyder sendiri kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari dua pertimbangan atau faktor yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Kedua pertimbangan tersebut yaitu; struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (*Internal Setting*) dan sistem internasional (*Eksternal Setting*). Kedua aspek ini memiliki posisi yang sama dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pengambilan keputusan.

Sehingga dalam konteks ini, penulis akan mencoba menganalisis serangkaian proses dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Yordania tetap konsisten mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina, tepatnya dalam aspek internal atau keadaan domestik Yordania sendiri dan juga pada aspek eksternal, dalam hal ini keadaan perpolitikan di Timur Tengah secara umum. Namun pada pembahasan kali ini, penulis lebih dahulu menganalisis faktor pengambilan kebijakan Yordania dalam aspek *internal setting*, sedangkan aspek *eksternal setting* akan dibahas dalam bab selanjutnya.



Di antara faktor-faktor internal tersebut terdiri dari: Kondisi sosial ekonomi dan politik Yordania; Pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan; serta Pengaruh Ideologi yang berkembang di Yordania.

#### **2.4.1 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Yordania**

Yordania merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Timur Tengah, dengan luas wilayah sekitar 90.000 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk negara ini sekitar 9,7 juta di tahun 2017, dan pada tahun 2020 populasi Yordania sekitar 10,20 juta, yang menjadikan negara ini terpadat ke-88 dari seluruh negara di dunia (Jordan Population, 2020).

Secara ekonomi, Yordania tidak terlalu kuat dibandingkan dengan tetangga Arabnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam negara ini begitu sedikit dan tidak memungkinkan Yordania sama dengan tetangganya yang memiliki kekayaan minyak sebagai basis perekonomiannya. Secara politis negara ini sangat rentan karena selain pemiskinan sumber daya, basis perekonomian negara ini berorientasi pada eksternal, serta pendapatan internal yang terbatas, sehingga sangat rentan dilanda krisis politik dalam perpolitikan nasionalnya (Mansour, 2014). Terlebih negara ini terletak di antara persimpangan wilayah yang mengalami kekacauan yaitu antara Israel-Palestina.

Berada di tengah wilayah yang mengalami kekacauan, tentu membawa dampak yang begitu signifikan terutama dalam masalah pengungsi. Keterkaitannya dengan masalah pengungsi, Yordania adalah satu-satu negara Arab yang memberikan kewarganegaraan dan hak-hak politik dan ekonomi kepada pengungsi Palestina (Chen, 2009, p. 45).

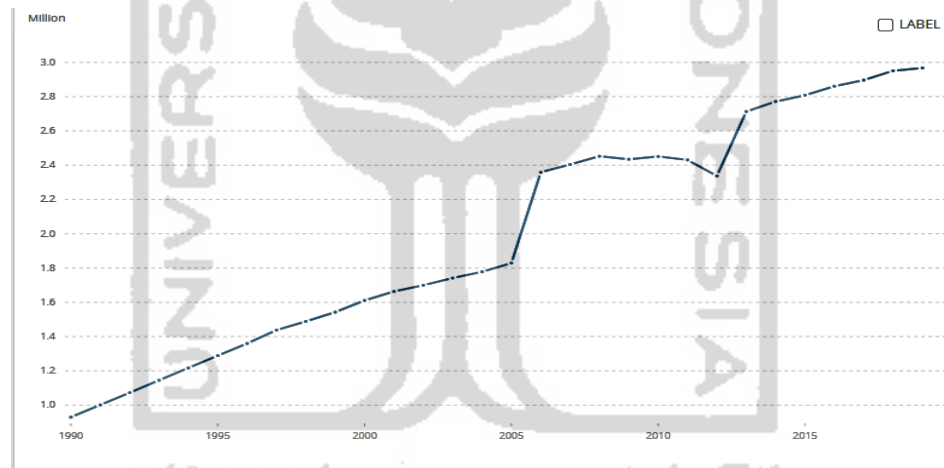
Namun demikian, semua itu menambah beban dan masalah negara ini. Menurut Salehyan dan Gleditsch (2006), menunjukkan bahwa aliran pengungsi dari negara-negara tetangga meningkatkan kemungkinan penyebaran konflik. Khususnya, para pengungsi menyebarkan perang saudara ke negara-negara yang berbatasan karena interaksi jaringan sosial pemberontak dengan aktor-aktor sosial di negara-negara penerima melalui ikatan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Selain itu, para pengungsi memberlakukan eksternalitas negatif, yang merepresentasikan beban ekonomi para pengungsi di negara tuan rumah dan membuat masyarakat tuan rumah memberontak terhadap kondisi ini (Salehyan & Gleditsch, 2006).

Hal ini berlaku dan dialami Yordania. Jika dilihat dari keadaan domestiknya, Yordania telah lama menderita dalam ketidakseimbangan yang begitu parah antara sumber daya dan populasi. Pada tahun 2010, Yordania memiliki populasi sekitar 6.190.000 juta orang, 60 persen di antaranya adalah pengungsi (Pew Research Report: Jordan, 2010). Pengungsi terbesar adalah tidak lain pengungsi yang berasal dari Palestina. Terdapat sekitar dua juta pengungsi Palestina di Yordania dan hampir satu juta lebih dari pengungsi masih belum terdaftar. Ini membuktikan bahwa Yordania merupakan satu-satunya negara yang memiliki populasi pengungsi Palestina terbesar untuk waktu ini. Fakta ini dibuktikan bahwa hampir dari 41 persen dari populasi pengungsi di negara ini adalah pengungsi Palestina (Microfinance in Jordan).

Dari tahun ke tahun penambahan populasi pengungsi di Yordania sendiri mengalami tren peningkatan yang begitu signifikan. Tren ini membuat Yordania khawatir karena banyaknya para pengungsi yang masuk akan berdampak negatif pada kedaulatan Yordania yang mengarah pada penciptaan negara Palestina di wilayah Yordania. Sehingga, hal ini menyebabkan Yordania tetap konsisten melirik solusi dua negara pada kebijakan luar negerinya dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.

**Gambar 3.**

Peningkatan Populasi Pengungsi Yordania 1990-2019



Sumber: <https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG?contextual=default&end=2019&locations=JO&start=1990&view=chart>

Gambar di atas memperlihatkan tren kenaikan pengungsi yang masuk ke Yordania dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 1990-2019. Pada tahun 1990-91 Yordania menyerap 300.000 pengungsi Palestina akibat invansi Irak, para pengungsi ini mengakibatkan kenaikan populasi Yordania sekitar 5 persen dan semakin menekan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik (Valentine, 2011, p. 20). Dalam laporan UNRWA 1990-91,

jumlah pengungsi Palestina di Yordania mencapai 960.212 pengungsi, tentu jumlah ini mengalami peningkatan, misalnya per Juni 2000 jumlah pengungsi Palestina di Yordania 1.570.000 pengungsi. Sedangkan menurut laporan lain yaitu dari *Department of Refugees Affairs of PLO* hingga 1998, jumlah pengungsi Palestina di Yordania mencapai 1.766.000 pengungsi (Chen, 2009, p. 43). Jumlah ini setiap tahun semakin meningkat di mana pada tahun 2018 dalam laporan *Palestinian Central Bureau of Statistics* diperkirakan jumlah total pengungsi Palestina mencapai 2.340.000 pengungsi (IMEMC, 2019). Sedangkan pada laporan *World Bank* jumlah pengungsi Palestina mencapai 2.900.000 pengungsi, sesuai dengan tabel di atas.

Banyaknya pengungsi yang masuk, semakin menambah ketegangan beban ekonomi negara ini. Keadaan ini diperparah dengan adanya krisis keuangan global tahun 2008 mengguncang fondasi ekonomi Yordania, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam investasi langsung asing dan aliran modal swasta ke Amman (Mansour, 2011). Selain itu, pemberontakan Arab memicu penurunan ekonomi regional dan mengguncang beberapa sektor kunci Yordania. Mitra dagang misalnya, terganggunya aliran gas alam dari Mesir yang memicu fluktuasi yang fluktuatif pada pasokan dan harga minyak di kawasan itu. Penurunan harga komoditas global, pembatasan ekspor, dan pengurangan pengiriman uang berdampak negatif terhadap ekonomi Yordania selama periode ini (Kouame, 2009). Akibatnya, tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Yordania menyusut dari 7,9 persen pada tahun 2008 menjadi 2,3

persen pada tahun 2010 (World Bank, 2014). Penurunan tajam tersebut memiliki implikasi negatif bagi pengangguran dan kenaikan harga komoditas di Yordania, terlebih dampak krisis ekonomi pada saat itu ditambah dengan kedatangan pengungsi akibat krisis Suriah memicu persepsi publik bahwa kesulitan ekonomi dan dampak sosial, politik yang terjadi di Yordania adalah akibat dari kehadiran berbagai banyak pengungsi yang masuk ke Yordania, meskipun ketidakstabilan regional adalah penyebab utamanya.

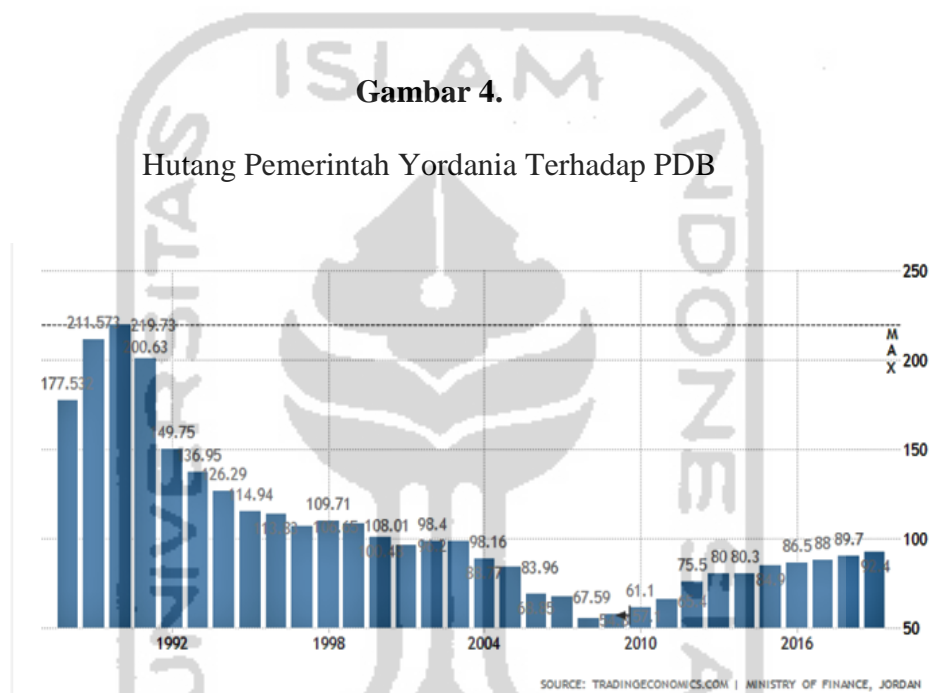
Sementara itu, Amman telah memulai program penghematan, memotong subsidi makanan dan energi, dan hal ini menimbulkan kemarahan rakyat (Satloff & Schenker, 2013, p. 5). Akibatnya, Yordan melakukan berbagai upaya program ekonomi dan sosial untuk mendukung populasi yang berkembang. Yordan dalam hal ini terpaksa bergantung pada dana yang bersumber dari eksternal untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang masuk akal serta program sosial ekonomi yang layak.

Salah satu negara utama sebagai pendonor bantuan luar negeri Yordania selain negara-negara Arab adalah Amerika Serikat. AS dalam hal ini merupakan mitra Yordania yang telah lama menjalin kerjasama dalam sejumlah masalah regional dan internasional. Dukungan AS telah membantu Yordania mengatasi kerentanan serius, baik internal maupun eksternal (Sharp, 2019, p. 2). Berkaitan dengan Pengungsi, AS merupakan salah satu negara pendonor terbesar di dalam badan bantuan PBB untuk para pengungsi palestina (UNRWA).

Menampung sejumlah besar populasi pengungsi Palestina telah memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi Yordania. Menurut *The Migration Policy Institute* Yordan menerima sejumlah besar bantuan pembangunan dari masyarakat internasional untuk mensubsidi pengungsi (Chatelard, 2010). Namun, terlepas dari adanya bantuan pendanaan pengungsi dari pihak internasional, dengan perubahan demografi yang terjadi, bagaimanapun juga Yordania akan memiliki tanggung jawab berkepanjangan yaitu tetap mengeluarkan biaya besar untuk mendukung dan merawat para pengungsi, seperti pendidikan, perumahan, infrastruktur di kamp-kamp serta layanan publik, tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Pengeluaran yang besar untuk pengungsi Palestina setiap tahun telah menjadi beban ekonomi yang berat bagi Yordan, terlebih pada tahun 2018 kemarin, administrasi Trump mengatakan tidak lagi melakukan pendanaan terhadap UNRWA (DeYoung, Eglash, & Balousha, 2018). Sikap ini juga ditujukan pada agensi-agensis kepengungsian lain seperti UNHCR dan WFP (*World Food Programme*) yang menangani jaminan gizi para pengungsi. Tentu keputusan AS tersebut merupakan pukulan bagi Yordania yang notabene ekonominya bergantung pada bantuan internasional.

Beban ekonomi akibat kebutuhan pembiayaan terhadap pengungsi telah menyebabkan Yordania mengadopsi strategi utang baru yang bergantung pada pinjaman luar negeri. Faktanya Rasio utang luar negeri Yordania terhadap PDB trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 misalnya, utang Yordania naik 200% lebih, dan ini terulang

ketika Yordania mengalami krisis pengungsi dari Suriah yaitu naik hampir 100% pada tahun 2019. Meskipun pada tahun 2019 terjadi tren penurunan daripada tahun 1990, tapi pada tahun 2019 ini lebih besar kenaikan utang luar negeri Yordania terhadap PDB daripada saat terjadinya krisis keuangan global 2008-2010. Gambar dibawah meberikan detail mengenai Rasio utang Yordania terhadap PDB dari tahun ke tahun.



Sumber: *Reprinted from Trading Economics (2020)*

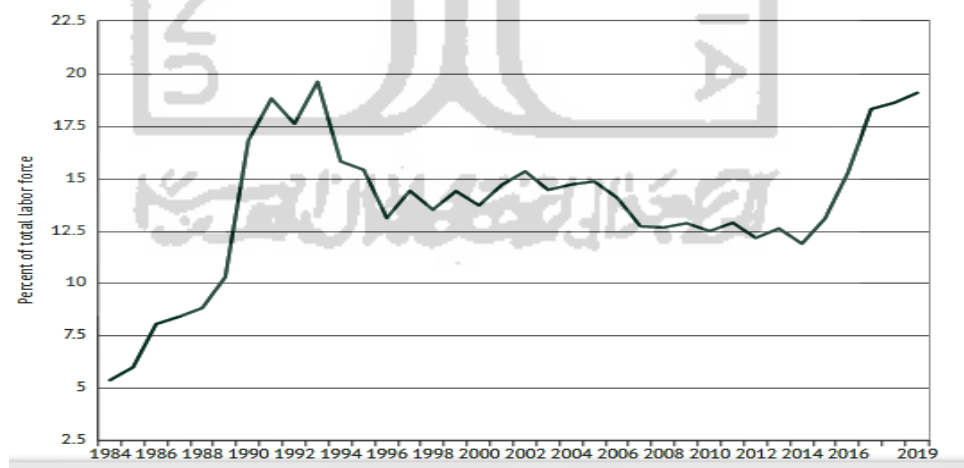
Keterpurukan dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh beban pengungsi yang semakin bertambah, secara tidak langsung membawa dampak pula terhadap banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran. Terlebih kondisi ini semakin diperburuk oleh masuknya pengungsi ke Yordania akibat krisis Suriah. Analisis pasar tenaga kerja Yordania menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Yordania tinggi dan

tingkat pengangguran perempuan dan laki-laki terus meningkat setelah krisis pengungsi Suriah (Alshoubaki & Harris, 2018, p. 170).

Tabel dibawah ini memperlihatkan tren peningkatan pengangguran Yordania dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993 jumlah pengangguran meningkat 19.6 pesen dari totang angkatan kerja Yordania, jumlah ini meningkat dari pada tahun sebelumnya yaitu sekitar 17.6 persen, dan ini terulang lagi pada priode 2000-2019, di mana pada tahun 2019 sekitar 19.1 persen. Meskipun tingkat pengangguran Yordania berfluktuasi secara substansial dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlahnya cenderung meningkat yang tentu ini berdampak pada kerentanan sosial dalam domestik Yordania.

**Gambar 5.**

Tingkat Pengangguran Yordania 1984-2019



Sumber: <https://knoema.com/atlas/Jordan/Unemployment-rate>



Hal ini terjadi, di mana banyak sekali masyarakat Yordania melakukan protes di Amman dan di Yordania utara terhadap memburuknya kondisi kehidupan Yordania karena masuknya para pengungsi. Misalnya, warga Yordania di Mafraq (Yordania Utara) memprotes kehadiran pengungsi di kota mereka dan persaingan mereka atas perumahan dan peluang kerja. Masyarakat menuntut pemerintah untuk menciptakan lowongan pekerjaan baru agar mereka dapat bertahan hidup serta untuk memulihkan keadaan mereka sendiri (Sharif, 2019). Permasalahan ini terutama dirasakan oleh orang-orang asli Yordania yang berada di Tepi Timur akibat dari adanya sentralitas para pengungsi yang berada diperkotaan dan mengambil berbagai macam pekerjaan yang tersedia untuk mereka.

Selain daripada dampak ekonomi yang disebabkan oleh para pengungsi, terdapat juga masalah eksternalitas demografis karena kedatangan para pengungsi dapat mempengaruhi keseimbangan etnis, apalagi sekarang tercatat bahwa persentase populasi di Yordania sekarang yang mendominasi adalah orang-orang Palestina yaitu Diperkirakan 55 sampai 70 persen dari populasi negara ini adalah keturunan Palestina (Valentine, 2011, p. 20). Tentu hal ini mengakibatkan adanya persaingan politik identitas antara orang-orang Palestina dengan orang-orang asli Yordania yang akan mengarah pada sangat rentan dilanda konflik saudara. Sebagai gambaran seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah pada tahun 1970, orang-orang Palestina menunjukkan otoritas mereka yang disebut Black September, di mana pada saat itu PLO dan para pengungsi

Palestina bekerjasama untuk menentang Yordania (Alshoubaki & Harris, 2018, p. 156). Bagi orang Yordania yang mengingat momen bencana dalam sejarah negara itu, masih ada kepahitan, dengan persepsi yang terpolarisasi secara dramatis. Oleh karena itu, sampai sekarang peristiwa tersebut dikenang oleh banyak orang di Yordania baik karena kebrutalan Hashemite dalam menindas PLO dan kamp pengungsi, atau karena ketidaksetiaan dan subversi Palestina.

Semenjak peristiwa tersebut, dan hingga sekarang identitas pengungsi Palestina di Yordania menjadi ambigu. Lila Sharaf, mengatakan bahwa “Identitas nasional orang Yordan mulai melukiskan dirinya sendiri sejak tahun 1970, ketika ada bentrokan antara identitas Palestina dan Yordania” (Gallets, 2015, p. 6). Bentrokan identitas yang dimaksud oleh Sharaf adalah Black September. Peristiwa tersebut memperjelas garis perbedaan antara orang Palestina dan Yordania. Apalagi ditambah dengan slogan “*Jordan is Palestine*” yang tidak diragukan lagi memicu kebencian secara umum terhadap orang-orang Palestina (Brand, 1995, p. 53).

Sampai sekarang politik identitas antara Yordania dan Palestina masih terjadi, apalagi hal ini kembali dipengaruhi adanya kejadian pemberontakan Arab pada tahun 2011, dan ini mengarah pada meningkatnya ketegangan antara Palestina dan Yordania Timur, dan bahkan antara suku-suku dalam komunitas Yordania sendiri khususnya yang berada di wilayah Tepi Timur terutama antara klan dan suku, karena hal ini juga menegaskan kembali identitas mereka yang terpisah (Ryan, 2011, p. 566). Sebagai akibatnya, orang-orang Palestina di Yordania

mendapati diri mereka terdiskriminasi struktural dan sosial di berbagai posisi, baik di sektor publik, ekonomi, militer maupun di dalam politik pemerintahan. Dalam politik pemerintahan misalnya, orang Palestina di Yordania masih kurang terwakili, dari 55 senator hanya 9 yang ditunjuk oleh Raja mewakili Palestina, dan di kamar Deputi yang berjumlah 110 kursi, Palestina hanya memiliki 18 kursi, begitu pun pada perwakilan setiap gubernur di masing-masing daerah, dari 12 gubernur Yordan, tidak ada yang dipimpin oleh Palestina (MRGI, t.thn).

Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa rasa frustrasi publik atas dampak kedatangan para pengungsi telah terbukti menjadi motivasi yang kuat dalam pengembangan kebijakan Yordania terhadap konflik Israel-Palestina. Oleh karenanya, kebijakan Yordania terkait solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan padatnya pengungsi di Yordania, merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Yordania.

Kekonsistenan Yordania dalam mendukung solusi dua negara, tidak lain salah satu bertujuan untuk mengurangi pengungsi yang saat ini berada di kamp-kamp pengungsian Yordania. Hal ini dibuktikan bahwa sejak 2008, pemerintah Yordania mengadopsi sebuah kebijakan yaitu melucuti kewarganegaraan warga Palestina, dengan menghapus nomor nasional individu dan mengganti kartu kuning mereka dengan kartu hijau. Dalam laporan *Human Rights Watch* (HRW) Februari 2010 misalnya, pada rentang 2004-2008 pemerintah Yordania telah melucuti sekitar 2.700 warga kewarganegaraan Yordania asal Palestina (HRW, 2010). Tentu

tindakan tersebut disayangkan karena merugikan ribuan orang. Namun demikian, Yordania berdalih bahwa tindakan tersebut adalah sarana untuk melawan setiap rencana Israel untuk memindahkan warga Palestina di Tepi Barat ke dalam kerajaan, dalam hal ini dapat membahayakan eksistensi kerajaan (Zahran, 2012, p. 4). Selain itu Yordania beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah upaya kerajaan untuk memperjuangkan hak-hak nasional pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka (Zion, 2020).

Namun alasan sebenarnya adalah keinginan Yordania untuk dapat membebaskan dirinya dari ratusan ribu warga Yordania asal Palestina yang kemudian dapat secara paksa dikembalikan Yordania ke Tepi Barat atau Israel sebagai bagian dari penyelesaian masalah pengungsi Palestina yang disebabkan oleh okupasi Israel tahun 1948, dan perang Arab-Israel 1967. Setidaknya itu tampaknya merupakan interpretasi dari seorang pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri Yordania yang pada Juli 2009 mengatakan bahwa orang Yordania tertentu asal Palestina akan tetap menjadi warga negara Yordania hanya sampai penyelesaian pengungsi tercapai (reliefweb.int, 2010).

Oleh karena itu, Yordania memandang bahwa masalah komponen Palestina dari identitas Yordania tidak bisa terselesaikan hingga sebelum tercapainya kesepakatan perdamaian final antara Israel dan Palestina, sehingga mereka dapat menyepakati pemulangan pengungsi dan pembentukan negara Palestina. Sehingga, tidak diragukan lagi bahwa pendirian negara Palestina akan mencerminkan secara positif masalah

identitas nasional Yordania (Salameh & El-Edwan, 2016, p. 10). Dalam hal ini, Yordania menegaskan posisinya tentang hak untuk kembali bagi para pengungsi di bawah naungan solusi dua negara.

#### **2.4.2 Pengaruh Dari Berbagai Kelompok Kepentingan**

Dalam pengambilan suatu kebijakan maka tidak jarang terdapat kelompok kepentingan di belakangnya. Disebut kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi “*policy influencer*”, karena kelompok ini mampu memberikan pengaruh terhadap pengambilan sebuah kebijakan pada suatu negara, terlebih negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Berkaitan dengan hal ini, Yordania bukanlah negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, negara ini menganut sistem monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer dan seorang raja menjadi kepala negaranya. Meskipun menganut sistem monarki konstitusional dalam pemerintahannya, Yordania juga menjalankan nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam hukum, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan media dan akademik (Fanack.com, 2018). Sehingga dalam hal ini, berbagai macam kelompok kepentingan memiliki kesempatan dan juga pengaruh besar untuk mempengaruhi pemerintahan Yordania dalam mengambil suatu kebijakan. Para kelompok ini memungkinkan mereka menyampaikan aspirasinya kepada kerajaan, meskipun penyampaian aspirasi tersebut tidak secepat pada negara yang menganut sistem demokrasi.

Tidak bisa dipungkiri terdapat kelompok kepentingan yang senantiasa mempengaruhi Yordania dalam mengambil sebuah kebijakan, terlebih dalam hal konsistensi Yordania mendukung solusi dua negara sebagai solusi akhir dalam konflik Israel-Palestina. Kelompok kepentingan ini bukan suatu kelompok yang termarginalisasi di dalam pemerintahan, melainkan kelompok yang selama ini mendukung eksistensi kerajaan, kelompok ini adalah suku-suku di Yordania terutama suku Arab Bedouin.

Bedouin merupakan suku yang selama ini menopang kerajaan, bisa dibilang sebagai tulang punggung rezim Hashemite dan di antara para pendukung kerajaan yang paling antusias. Loyalitas suku terhadap kerajaan telah dibangun di atas hubungan material sejak 1920-an dan 1930-an, ketika para perwira Inggris dan monarki yang baru lahir mulai memobilisasi dukungan suku setempat melalui distribusi strategis perlindungan seperti tanah, subsidi agraria, dan layanan sosial (Yom, 2014, p. 8).

Suku selalu terhubung dengan raja di masyarakat Yordania. Koneksi ini berasal dari peran kunci suku-suku dalam mendukung monarki Hashemite. Suku-suku Badui diidentifikasi dengan kaum Hashemite, karena legitimasi sosial raja berasal dari klaim tradisional tentang kekerabatan, agama, dan kinerja sejarah. Selain itu, suku-suku menikmati legitimasi institusional dalam proses hukum karena raja bekerja erat dengan suku-suku, dengan cara tertentu, dianggap sebagai pemimpin suku. Kesetiaan seorang anggota suku tumbuh dari keinginan untuk mempertahankan kehormatan keluarga, suku dan raja, dan bukan pada

gagasan abstrak tentang patriotisme Yordania (Oudat & Alshboul, 2010, p. 70). Warga suku menerima hak untuk memerintah, berdasarkan pada klaim agamanya, yang berfungsi ganda sebagai klaim suku, dan kualifikasi pribadinya sebagai pemimpin suku (Satloff, 1986, hal.60).

Dalam hal ini tidak mengejutkan suku-suku ini selalu mendominasi dalam kerajaan, bahkan hari ini identitas suku, meskipun secara signifikan dimodifikasi sejak zaman mandat, terus memainkan peran utama dalam politik Yordania. Sarjana modern Yordania telah mengakui hubungan khusus antara suku-suku dan monarki Hashemite. Mereka juga menekankan terdapat sentralitas suku dan budaya politik kesukuan di Yordania (Alon, 2005).

Kasus Yordania adalah kasus yang begitu menarik, di mana menunjukkan bagaimana struktur suku beroperasi sebagai kerangka kerja antara elit politik dan penduduk. Oleh karenanya, suku-suku dapat dipahami dan dianggap sebagai elit, sejauh para pemimpin mereka adalah bagian penting dari kemapanan politik dan sebagai bagian dari populasi yang mewakili masyarakat Yordania secara keseluruhan (Rodríguez, 2018, p. 3). Rezim dalam hal ini, tidak memonopoli instrumen kekuasaan, institusi kesukuan tradisional masih memiliki pengaruh besar melalui sistem otoritas politik kesukuan dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karenanya di Yordania sendiri terdapat istilah *Haqq al-Dawlah* (hak negara) dan *al-Haqq al-Asha'iri* (hak suku) (Oudat & Alshboul, 2010, p. 91). Dalam hal ini, para kelompok suku tersebut selalu memanfaatkan hak istimewa tersebut serta mempertahankan dan melindungi posisi historis

mereka. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya dalam kerajaan.

Berkaitan dengan isu Palestina, suku-suku ini menganggap orang-orang Palestina di Yordania sebagai tamu dan suatu saat tamu itu harus kembali ke rumahnya (Siryoti, 2019). Mereka menentang bangkitnya peran sipil dan politik Palestina di Yordania, yang mau tidak mau akan membatasi peran politik mereka (Barcik, 2008, p. 144). Pengucilan politik masal ini juga dipraktikkan oleh para elit politik, yang menganggap orang Palestina sebagai orang asing meskipun sebagian besar adalah termasuk warga negara Yordania.

Sejalan dengan ini, para suku selalu menekan pemerintahan untuk memperjuangkan hak nasional orang palestina untuk kembali ke tanah kelahirannya. Namun, ini bukan berarti tanpa tujuan yang melatar belakanginya, melainkan terdapat kepentingan para kelompok suku, yaitu untuk mempertahankan identitas keaslian kerajaan Yordania yang mana seharusnya didominasi oleh orang-orang Bedouin bukan orang Palestina yang notabene awalnya sebagai pengungsi di Yordania.

Dinamika identitas ini sangat jelas yaitu cenderung kuat ke arah melindungi orang-orang asli Yordania dari dominasi orang Palestina. Sehingga ini menyebabkan perubahan sosial yaitu sikap para suku yang pada awalnya dikenal sangat begitu loyalitas telah berubah mengeluarkan kritik pada kerajaan. Peningkatan kritik terhadap rezim dan monarki sebelumnya belum pernah terjadi, namun karena adanya anggapan oleh para suku bahwa Yordan di jual ke kelas ekonomi Palestina dan sekarang



menjadi elit pemerintah yang semakin meningkat. Kedudukan Raja telah dirusak lebih jauh oleh persepsi bahwa Ratu Rania (Istri Raja Abdullah II) tidak simpatik kepada Bankir Timur dan telah menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan Palestina. Sang Ratu berasal dari Tulkarem di Tepi Barat dan dibesarkan di Kuwait, di mana komunitas Palestina secara historis merupakan benteng dukungan untuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) (Rish, 2012). Namun, terdapat alasan yang lebih gelap yang sembunyi di bawahnya, yaitu kerentanan ekstrim regional yang mengancam kerajaan yang berkaitan dengan diskusi Israel tentang Yordania sebagai tanah air “alternatif” bagi Palestina (Hadi, Ahmad, Omar, & Bahjat, 2016, p. 296).

Mereka berpendapat bahwa dukungan raja terhadap masalah pengembalian pengungsi dan kegagalannya untuk menyelesaikan pemisahan dari Tepi Barat tetap membuka kemungkinan hubungan federal atau konfederasi di masa depan dengan Otoritas Nasional Palestina yang telah muncul di Tepi Barat setelah Kesepakatan Oslo 1993, antara Israel dan PLO. Sehingga dalam hal ini, suku-suku ini menekankan atas pengembalian hak orang Palestina di Yordania ke tanah kelahirannya di Yerusalem. Mereka menuntut agar semua warga Palestina di kerajaan divestasi dari kewarganegaraan penuh Yordania, sehingga orang-orang Palestina dapat terpenuhi apa yang menjadi hak mereka. Berbagai macam pernyataan ini merupakan sebuah retorika yang mengarah pada semacam kontra-manifesto dalam rangka pendekatan yang lebih lembut untuk melindungi politik identitas Yordania. Untuk itu, suku-suku ini sangat

merespon positif adanya paradigma solusi dua negara yang mengarah pada penciptaan negara Palestina yang tentunya jika ini terjadi dapat mempermudah pengembalian orang-orang palestina di Yordania kembali ke tanah kelahirannya.

Dalam hal ini, Yordania menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh para suku tersebut merupakan sebuah upaya untuk melindungi identitas, kekuatan serta kemampuan negara untuk supaya tidak lebih jauh dalam melangkah yang mengakibatkan kerentanan perpecahan pada negara yang dapat membahayakan eksistensi Hashemite. Oleh karenanya, Yordania tidak menginginkan adanya perpecahan lebih lanjut di dalam internal domestiknya terutama mengenai keamanan suku yang selama ini mendukung penuh rezim Hashemite. Suku-suku tersebut tetap menjadi tulang punggung bagi rezim, terlepas dari berbagai retorika yang ada, bagaimanapun, rezim tidak pernah meninggalkan komitmennya kepada suku-suku, sebagaimana dibuktikan oleh reservasi jabatan tingkat tinggi yang sensitif untuk orang Transjordan dan preferensi untuk Bank Timur dalam subsidi ekonomi, bahkan selama periode persatuan dua bank, monarki Hashemite tetap mengutamakan kepentingan para suku.

Oleh karenanya, para suku merupakan salah satu faktor yang dominan dari berbagai kelompok kepentingan yang terdapat di Yordania untuk mempengaruhi kebijakan Yordania tetap konsisten mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Meskipun dalam hal ini banyak sekali kelompok kepentingan seperti partai politik yang terdapat di

Yordania, namun tidak satupun dari mereka memainkan peran nyata akibat kurangnya organisasi dan platform politik yang jelas.

Idealnya, partai politik memainkan peran penting dalam pemerintahan dengan mengirimkan preferensi publik kepada pemerintah. Ketika berhasil bergabung dalam pemerintahan, para elit parpol juga menjadi partisipan penting dalam perumusan kebijakan. Terakhir, partai memainkan peran penting dalam mengungkapkan dan mempromosikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Singkatnya, partai politik yang efektif meningkatkan komunikasi antara massa dan pemerintah, dan mereka harus memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan pemerintah.

Namun di tahun 1950-an partai-partai politik di Yordania tidak memainkan peran yang begitu signifikan dalam membentuk pemerintahan. Begitu juga pada dekade 1990-an hingga sekarang, partai politik Yordania sebagian besar telah gagal memainkan peran ini. Kaitan antara partai politik dan massa tampak lemah, baik diukur dari keberhasilan partai tersebut dalam pemungutan suara, kemampuan mereka untuk memobilisasi massa di jalan-jalan, atau keberhasilan mereka dalam mendirikan media. Selain itu, sebagian besar partai politik tidak dapat bergabung dengan pemerintah dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Okar, 2001, p. 546). Tentu hal terbesar menyebabkannya karena adanya pembatasan terhadap parpol secara signifikan oleh faktor kelembagaan, dalam hal ini Raja diberi kekuasaan eksekutif yang agak lebih luas daripada yang biasanya terjadi pada raja konstitusional pada umumnya,

sehingga sulit bagi suatu partai untuk memenangkan kendali atas pemerintah hanya di kotak suara apalagi dalam mempengaruhi rezim dalam mengambil suatu kebijakan.

Sekarang, partai yang mendominasi di pemerintahan adalah partai Front Aksi Islam (IAF), partai yang memiliki afiliasi terkait erat dengan Ikhwanul Muslimin (Okar, 2001, p. 546). IAF telah menjadi oposisi yang begitu loyal sejak pendiriannya pada tahun 1992, partai ini lebih menekankan taktik reformis daripada militan, dan sejauh ini merupakan partai politik terbesar dan terorganisir terbaik di kerajaan. IAF telah menjadi lawan vokal kebijakan AS di wilayah tersebut, terutama mengenai Palestina dan Irak, selain itu IAF sangat menentang hubungan normal dengan Israel pada tahun 1994 dan telah mengambil peran utama dalam menolak normalisasi (Brown, 2006, p. 9).

IAF telah mengembangkan tingkat dukungan yang meningkat di antara kelas-kelas bawah dan khususnya di antara warga perkotaan Palestina dari berbagai kelas. Oleh karena itu, IAF melihat kekuatan elektoralnya di perkotaan, komunitas mayoritas Palestina seperti Irbid, al-Zarqa, dan sebagian besar distrik di Amman. Namun undang-undang pemilu Yordania mendukung daerah pedesaan dan sumber dukungan tradisional untuk keluarga Hashemite yang berkuasa di Yordania (Althbutat & Ghawanmeh, 2014, p. 183).

Hal ini membuktikan adanya pembatasan terhadap parpol secara signifikan oleh faktor kelembagaan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, dalam hal ini Raja diberi kekuasaan eksekutif yang agak

lebih luas membuat adanya gerakan terbatas terhadap partai politik, di mana kebijakan pemerintah dirancang untuk menghambat perkembangan parpol yang berhasil dan fungsional (Bondokji, 2015, p. 5). Sehingga, meskipun IAF merupakan partai terbesar di Yordania, juga agak sulit dalam mempengaruhi pemerintahan dalam mengambil suatu kebijakan. Fakta ini terbukti ketika IAF melakukan oposisi terhadap normalisasi hubungan antara Yordania-Israel pada tahun 1994, namun pihak kerajaan tetap melakukan hubungan normalisasi tersebut (Brown, 2006, p. 10). Bahkan untuk melawan IAF yang menentang adanya hubungan normalisasi, pihak pemerintah pada tahun 1993, mengubah undang-undang pemilu menjadi satu suara yang tidak dapat dialihkan, strategi ini ditujukan pada IAF untuk mengurangi prospek kaum Islamis untuk kemenangan elektoral. Meskipun para Islamis awalnya memprotes undang-undang pemilu yang baru, mereka akhirnya setuju dan ikut serta dalam pemilu. Alhasil Undang-undang pemilu yang diamandemen memiliki efek yang diinginkan, kelompok Islamis kehilangan kursi di parlemen sementara kandidat dari suku dan pro-pemerintah memenangkan mayoritas parlemen (Barari, 2014, p. 105).

Selain itu, adanya pembatasan terhadap pergerakan partai juga menghiiasi dinamika partai politik dalam menjalankan fungsionalnya. Pada tahun 2014 misalnya, pemerintah tidak mengizinkan IAF untuk mengadakan rapat umum keempat di aula umum dan mencegah entitas swasta menyewakannya ke IAF (Bondokji, 2015, p. 5). Sikap ini secara

terus menerus dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya kepada IAF namun juga dengan partai politik lainnya.

Berkaitan dengan kebijakan Yordania tetap konsisten mendukung solusi dua negara, berbagai partai politik termasuk IAF mendukung kebijakan ini, apalagi IAF merupakan partai yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin yang tentu sangat pro terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, di sini IAF tidak termasuk kelompok kepentingan yang dominan mempengaruhi rezim Yordania dalam sikap konsistensinya mendukung solusi dua negara melainkan adanya desakan dari berbagai suku terutama suku-suku Badouin yang notabene orang-orang asli Yordania yang selalu menekan pemerintah dalam mengembalikan para pengungsi yang tentunya menuntut pendirian negara Palestina. Selain itu, konsistensi Yordania terhadap solusi dua negara merupakan salah satu bentuk inisiatif kerajaan dalam menghadapi situasi domestik maupun regional yang selama ini menghiasi perpolitikan Timur Tengah.

#### **2.4.3 Pengaruh Ideologi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Yordania adalah faktor ideologi, Ideologi yang berkembang di Yordania adalah Nasionalisme. Nasionalisme Yordania muncul sebagian besar dari peristiwa-peristiwa geopolitik dan wacana nasionalisme Arab. Ideologi ini berkembang dimulai pada awal 1970-an sebagai reaksi terhadap ancaman Palestina yang dirasakan terhadap identitas Transyordania yang berasal dari para pengungsi yang masih menyeberang ke Yordania dari Tepi Barat (Gallets, 2015, p. 7). Terlebih ketakutan ini ditambah dengan adanya

pemberontakan yang dilakukan PLO pada tahun 1970, dalam rangka menggulingkan negara Yordania sebagai langkah menuju pembebasan Palestina di sebelah barat sungai Yordan.

Nasionalisme telah menjadi salah satu dinamika utama untuk pengembangan identitas nasional di Yordania. Konstelasi identitas ini, bagaimanapun, adalah produk dari momen sejarah tertentu dalam sejarah kerajaan: periode setelah pendudukan Israel di Tepi Barat pada tahun 1967, kebangkitan bersama Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan dari Palestina, dan perang saudara Black September 1970 antara tentara Yordania dan milisi Palestina yang berafiliasi dengan PLO. Sebelum itu, identitas nasional Yordania adalah ekspresi lokal dari proyek nasionalis anti-kolonial dan Arab yang lebih besar. Namun, sekarang ide nasionalisme itu berkembang dan terbatas pada struktur sebuah negara yaitu dalam struktur Yordania itu sendiri. Sehingga dalam berbagai dinamika yang terjadi, ide nasionalisasi lebih diutamakan dibandingkan permasalahan yang sedang dihadapi. Ini merupakan kewajiban bagi sebuah negara dalam melindungi agenda kepentingan nasional mereka.

Kehadiran pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania tetap menjadi masalah yang menonjol dan merupakan salah satu pemantik dari meningkatnya nasionalisme di Yordania. Saat ini, ada dua pemahaman tentang nasionalisme Yordania kontemporer, yaitu berpusat pada negara dan berpusat pada masyarakat (Lynch, 1998). Namun menariknya, ketergantungan pada suku-suku untuk berlanjutnya legitimasi negara

memainkan peran penting dalam keduanya. Di mana tren nasionalisme berpusat pada negara yang pro rezim, menekankan adanya hubungan yang erat antara para suku, negara, militer dan rezim Hashemite. Dalam hal ini, suku-suku ini penting terutama melalui layanan mereka di tentara dan kesetiiaannya pada raja. Sedangkan negara dan raja pada tatanan ini sangat penting dalam menyatukan bangsa Yordania. Sebaliknya, pandangan nasionalisme Yordania yang berpusat pada masyarakat menganggap suku sebagai titik awal dan akhir nasionalisme Yordania (Lynch, 1998, p. 23).

Nasionalisme berperan penting dalam menekan kebijakan Yordania dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Bagaimanapun juga, ideologi ini telah menjamur ke dalam akar rumput masyarakat Yordania khususnya pada orang-orang Tepi Timur. Orang-orang yang berada di Tepi Timur yang didominasi oleh berbagai macam suku asli Yordania selalu menekankan bahwa prinsip-prinsip nasionalisme harus terkandung di dalam kebijakan luar negeri Yordania. Untuk itu, salah satu tujuan utama para nasionalis ini adalah untuk mempengaruhi pemerintah pada setiap pembuatan kebijakan luar negeri, terlebih dalam menghadapi persoalan antara Israel dan Palestina.

Pada Mei 2010 misalnya, sekelompok pensiunan militer yang menyebut diri mereka sebagai *National Committee of Military Veterans* (NCMV), yang notabene dari kelompok Nasionalis, menerbitkan sebuah petisi yang langsung mengarah pada monarki Hashemite. Petisi tersebut mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap penyelesaian akhir mengenai kasus Palestina dengan mengorbankan Yordania melalui



tekanan eksternal untuk menyelesaikan status akhir para pengungsi di kerajaan (David, 2010). Tuntutan tersebut melegitimasi pelepasan Tepi Barat pada Juli 1988, yang mengarah pada pencabutan hak pilih seluruh penduduk Palestina dari kerajaan, baik langsung atau tunduk pada implementasi Resolusi PBB 194 yang menyerukan kembalinya pengungsi Palestina ke rumah mereka, dan bahwa militer diperkuat dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman Zionis dengan mengadopsi metode perang gerilya (David, 2010).

Nasionalis Yordania mengemukakan argumen bahwa hubungan dengan Tepi Barat menimbulkan ancaman yang tidak dapat diterima terhadap kehidupan Yordania sebagai negara merdeka (Hadi et al, 2016, p. 203). Bahkan para kaum nasionalis menganggap bahwa hubungan Yordania dengan Tepi Barat merupakan bentuk bunuh diri nasional (Barari, 2014, p. 92). Nasionalis Tepi Timur yang melihat diri mereka sebagai tulang punggung negara, melihat orang-orang Palestina yang tinggal di Yordania merupakan ancaman bagi identitas Yordania. Maka bagi kaum nasionalis, tujuan utama yang harus dilakukan adalah mempertahankan Yordania dari segala ancaman tersebut. Dalam hal ini, para kaum nasionalis ini selalu berusaha untuk duduk dalam pemerintahan dengan menduduki posisi yang penting, seperti Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan lain-lain. Ini terbukti dengan mendominasinya para nasionalis di berbagai sektor yang mengakibatkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang Palestina.

Dalam bidang pertahanan misalnya, seperti polisi, angkatan bersenjata dan badan intelijen (*mukhabarat*), selalu didominasi oleh para nasionalis Tepi Timur. Kedudukan ini secara tidak langsung mereka lihat sebagai upaya loyalitas mereka dalam menjaga pertahanan negara yang tidak hanya melindungi negara dari ancaman luar, tetapi juga pertahanan rezim terhadap ancaman internal, dan pada akhirnya, melindungi nasionalis Yordania sendiri (Tell, 2004).



**BAB III :**  
**HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN YORDANIA TETAP**  
**MENDUKUNG SOLUSI DUA NEGARA DARI ASPEK *EKSTERNAL***  
***SETTING***

**3.1 Faktor *Eksternal Setting* Mempengaruhi Kebijakan Yordania Tetap Konsisten Mendukung Solusi Dua Negara**

Setelah membahas faktor yang mempengaruhi kekonsistenan kebijakan Yordania dalam solusi dua negara dari aspek *Internal Setting* pada bab sebelumnya, pada bab ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Yordania konsisten mendukung solusi dua negara dari aspek *Eksternal Setting*. Dalam hal ini, selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan salah satu faktor yang menjadi aspek dominan yang harus dipertimbangkan suatu negara dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan negara dalam menghadapi suatu fenomena yang ada.

Berkaitan dengan ini, Yordania selaku aktor negara dalam merumuskan suatu kebijakan dan kemudian merealisasikannya sebagai bentuk tindakan politik luar negeri, mempertimbangkan aspek eksternal tersebut sebelum mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini, penulis mengklasifikasikan faktor eksternal tersebut menjadi beberapa bagian antara lain: Wacana Yordania dijadikan Tanah Air Alternatif bagi warga Palestina "*al-Watan al-Badil*"; Ancaman stabilitas keamanan dari kelompok radikal; serta Kondisi perpolitikan Timur Tengah.

**3.1.1 Wacana Yordania Dijadikan Tanah Air Alternatif Bagi Warga Palestina "*al-Watan al-Badil*"**

Perjuangan Yordania terhadap tanah Palestina selalu berbanding terbalik terhadap apa yang diharapkan sebagai status akhir dari konflik ini. Berbagai macam dinamika permasalahan baik dengan Palestina maupun

Israel telah menjadi warna politik yang selama ini menghiasi hubungan antara ketiga negara ini. Salah satunya adalah mengenai permasalahan tanah air alternatif bagi orang-orang Palestina.

Wacana Yordania yang akan dijadikan tanah air alternatif bagi orang-orang Palestina “*al-Watan al-Badil*” atau “*Jordan is Palestine*” merupakan sebuah wacana yang selama ini menghantui rezim Hashemite. Sehingga tidak bisa dipungkiri, wacana tanah air alternatif ini merupakan salah satu faktor dominan menyebabkan Yordania selalu mendukung hak independen Palestina di Tepi Barat. Wacana ini pertama kali dikeluarkan oleh partai Likud, partai sayap kanan Israel. Likud yang pada saat itu berkuasa menganggap bahwa Yordania merupakan wilayah bagian dari Palestina.

Pada awalnya, partai Herut yang cikal bakal Likud secara radikal beranggapan bahwa Yordania merupakan bagian dari Integral tanah Israel. Menachem Begin pemimpin Likud terkenal karena ideologi Zionis revisionisnya sangat percaya pada ajaran Eretz Israel, dalam hal ini klaim Israel terhadap gagasan hak historis Yahudi untuk seluruh tanah Palestina. Begin berkomitmen akan hal ini, baginya kedua Tepi adalah ‘Yudea dan Samaria’ sehingga ia sangat menentang rencana pemisahan oleh PBB tahun 1947 dan perjanjian gencatan senjata tahun 1949 dengan Yordania (Barari, 2014, p. 64-65).

Namun, semua klaim tersebut berubah seketika mengikuti perubahan dinamika regional dan internal yang ada. Begin menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan luar

negeri Israel, sehingga dengan terpaksa ia melakukan moderasi dan berkoalisi dengan elit politik lainnya serta meninggalkan ideologi sayap kanannya yang sudah mengakar (Barari, 2014, p. 66). Perubahan inipun berdampak pada perubahan klaimnya terhadap Yordania sebagai wilayah Israel. Kendati demikian, ini merupakan bukan akhir dari permasalahan yang dihadapi Yordania, melainkan permasalahan baru muncul dalam bentuk retorika yang berbeda. Dalam hal ini, Israel mengorientasikan ulang strateginya menuju Amman, bahwa Yordania bukan lagi bagian integral Israel melainkan Yordania bagian dari tanah Palestina (Bookmiller, 1997, p. 92).

Berkuasanya partai Likud dalam pemerintahan Israel pada tahun 1977, telah membuat peran eksistensi Yordania di Tepi Barat semakin berkurang, malahan situasi ini berbalik arah mengancam rezim Hashemite. Bagi Israel, *Jordan is Palestine* memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang Yahudi. Premis ini memberikan pendefinisian ulang dalam konflik Arab-Israel, sehingga tidak lagi tentang dua orang yang berjuang untuk satu negara, yang pada kenyataannya sulit direalisasikan, melainkan dua orang masing-masing mendapatkan bagian tanah. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi mendapatkan Palestina bagian Barat dan sekarang disebut Israel, sedangkan orang-orang Arab mendapatkan Palestina bagian Timur yang sekarang disebut Yordania (Pipes & Garfinkle, 1990, p. 97).

Oleh karenanya, *Jordan is Palestine* dijadikan sebagai premis resmi kebijakan Israel terhadap Palestina. Sebagaimana yang dikatakan mantan perdana menteri Israel Yitzhak Shamir “Jika orang-orang Palestina

berbicara tentang Negara Palestina, itu harus dibangun di sebelah timur sungai, di mana mereka sudah menjadi mayoritas” (Weeklyworker.co.uk, 2020). Tentu anggapan ini merupakan sebuah petaka dan merupakan mimpi buruk bagi Yordania.

Menghadapi hal tersebut, Yordania selalu berusaha memainkan perpolitikan pragmatis terhadap Israel. Salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian damai pada tahun 1994 dengan Israel. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara (Zeevi, 2020, p. 2). Di samping itu, perjanjian ini diharapkan menciptakan kewajiban di pihak kedua negara untuk menghormati kedaulatan dan institusi masing-masing (Terrill, 2010, p. 58).

Di lingkungan kawasan, Banyak orang-orang mengharapkan perjanjian perdamaian yang sudah ditandatangani tersebut memberikan sebuah jalan bagi adanya rekonsiliasi antara Israel dan dunia Arab yang lebih luas, serta menempatkan Yordania dalam posisi untuk menengahi penyelesaian yang adil antara Israel-Palestina. Namun, semua harapan itu jauh dari kata berhasil, menjadi harapan fatamorgana yang selalu di elu-eluhkan kebanyakan masyarakat internasional. Hubungan yang pada awalnya diharapkan akan menjadi basis perubahan pada akhirnya tanpa membuahkan hasil, hubungan antara keduanya mengalami kemunduran yang terasa hambar atau sering disebut sebagai hubungan dingin, bahkan perjanjian ini tidak pernah populer dengan porsi signifikan dari publik

Yordania yang menyebabkan terjadinya gerakan anti-normalisasi yang kuat di Yordania (Terrill, 2008, p. 59).

Kematian Yitzhak Rabin menjadi titik awal hubungan dingin terjadi antara Yordania dan Israel. Rabin yang menjabat sebagai perdana menteri pada saat itu memiliki visi yang begitu besar terhadap rencana perdamaianya dengan Yordania. Di bawah Rabin, Israel akan mencapai kesepakatan damai dengan Palestina, Suriah dan diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Untuk melakukan itu semua, Israel harus mengembalikan dataran tinggi Golan ke Suriah dan mengakui negara Palestina di bawah perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Namun, semua rencana tersebut tidak pernah terjadi, rasa optimisme, kerja sama regional, dan perdamaian abadi telah hilang ketika Rabin dibunuh pada tahun 1995 oleh seorang Israel radikal (Sharif, 2019). Semenjak pembunuhan tersebut hubungan Yordania dengan Israel berubah drastis, apalagi hubungan Yordania dengan penerus Rabin yaitu Shimon Peres tidak terlalu kuat.

Ketakutan akan opsi Yordan sebagai tanah air alternatif Palestina kembali membayangi rezim Hashemite. Tentu hal ini tidak bisa diabaikan, terlebih Yordania bisa dikatakan sebagai rumah bagi setengah rakyat Palestina dan ini merupakan sebuah solusi dan bukan sekedar bagian dari masalah yang sedang di hadapi Yordania. Dan benar saja, Israel menempatkan klaimnya tersebut sebagai bagian dalam leksikon politik mereka, bahkan kemungkinan besar berada dalam kantong trik politik pemerintah Israel. Ariel Sharon sebagai pewaris sayap kanan dalam

sebuah wawancara yang dilakukan salah satu surat kabar Israel pada tahun 2001, mengatakan bahwa “Saya belum mengubah pandangan dunia saya. Satu hal yang telah berubah adalah pandangan saya tentang Yordania sebagai Palestina, dan itu hanya karena ada kenyataan (di lapangan) di sini. Saya tidak pernah percaya seharusnya ada dua negara Palestina. Itulah satu-satunya perubahan yang terjadi di posisi saya” (Bahour, 2001).

Peluncuran proses perdamaian antara Yordania-Israel pada tahun 1994 tidak banyak membantu meredakan ketakutan ini. Hingga sekarang, premis ini masih membayangi opsi penyelesaian status akhir dalam konflik. Israel di bawah Netanyahu pun demikian, semakin memperburuk proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan Yordania.

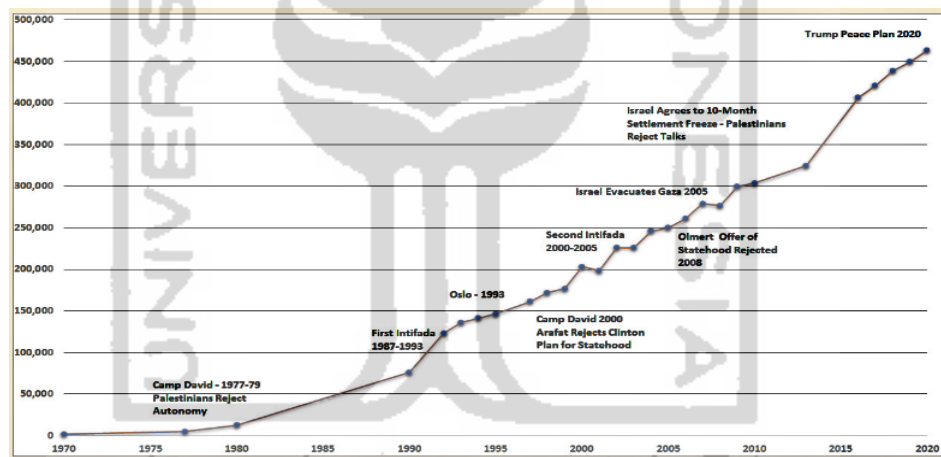
Tidak bisa dipungkiri bahwa naiknya Netanyahu menjadi perdana menteri pada 1996, mengubah hubungan hangat antara Yordania dan Israel ke hubungan yang lebih dingin. Di awal pengangkatannya sebagai perdana menteri, Netanyahu membentuk koalisi pemerintahan sayap kanan, termasuk Likud, di mana tujuh dari delapan anggota partai menolak perjanjian Oslo. Karena itu, Netanyahu diberi mandat untuk membatalkan perjanjian Oslo, dan upaya kebijakannya yang sembrono dengan cepat merusak hubungan bilateral Israel dengan Yordania (Barari, 2014, p. 112).

Berkaitan dengan wacana Yordania sebagai tanah pengganti untuk orang Palestina, Netanyahu tidak secara eksplisit menyuarakan wacana opsi Yordan sebagai status akhir dari konflik. Bahkan jauh setelah perjanjian Oslo Netanyahu di bawah Likud melepaskan dirinya dari slogan “*Jordan is Palestine*” dan mendukung penuh perjanjian damai antara



Yordania dan Israel (Barari, 2014, p. 70). Meskipun demikian, secara tidak langsung ia telah melegitimasi opsi Yordan sebagai tujuan akhir dari politik Israel. Hal ini dilihat dari satu tahun setelah pengangkatannya, Netanyahu mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu untuk memperluas pemukiman Yahudi di Tepi Barat (Bookmiller, 1997, p. 98). Ekspansi pemukiman ini berdampak besar terhadap pertumbuhan populasi Yahudi di Tepi Barat, dan ini mengalami tren peningkatan dalam setiap tahunnya.

**Gambar 6.**  
Pertumbuhan Populasi Yahudi di Tepi Barat 1970-2020



Sumber: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/facts-about-jewish-settlements-in-the-west-bank>

Yordania menganggap bahwa ekspansi pembangunan permukiman secara ilegal yang terus-menerus dilakukan Netanyahu berdampak besar terhadap terealisasinya solusi dua negara dalam konflik ini. Ekspansi ini juga akan memperparah masalah pengungsi, ditambah dengan kekhawatiran terhadap memburuknya kondisi kehidupan Tepi Barat dapat

menyebabkan migrasi skala besar mereka ke Yordania dan bahwa Yordania mungkin diusulkan sebagai alternatif tanah air Palestina di masa depan. Hal ini juga telah membuat Yordania mengejar kebijakan Jordanisasi yang mengarah pada reformasi tata kelola pembangunan negara secara keseluruhan (paljourneys.org, t.thn).

Dalam perjalanannya, Israel di bawah Netanyahu membuat Israel telah berubah secara lebih fundamental dan posisinya dalam perdamaian belum sejalan dengan kepentingan Yordania. Hal ini dibuktikan bahwa selama Netanyahu memegang kendali tampuk kepemimpinan sebagai perdana menteri, resolusi proses perdamaian antara Israel-Palestina tidak pernah mengalami peningkatan bahkan bisa dibilang mengalami kematian. Bahkan, dalam kampanye pemilihan 2015, Netanyahu berjanji kepada para pemilihnya bahwa tidak ada negara Palestina yang akan dibentuk selama mandatnya (Rudoren, 2015). Dan pada tahun 2019, Netanyahu kembali mengumumkan pada pemilihnya bahwa jika ia memenangkan pemilihan umum pada September nanti, ia berjanji untuk menerapkan kedaulatan Israel di Lembah Jordan dan Laut Mati bagian utara (aljazeera.com, 2019). Tentu, ini bukan sekedar retorika untuk menyenangkan para pemilihnya, melainkan sebagai bagian dari leksikon politik yang selama ini menjadi tujuan akhir dari Israel.

Jelas ini menandakan bahwa Israel tetap berada dalam posisi historis mereka mengenai tanah Palestina. Israel seakan-akan putri malu yang bisa bangun kapanpun dan akan mengambil semua tanah Tepi Barat sebagai bagian dari Israel, ini merupakan masalah waktu dan kondisi yang

tepat untuk mengambil kesempatan itu. Dalam hal ini, Yordania menyadari bahwa hubungannya yang semakin terpuruk dengan Israel akan berdampak pada rezim Hashemite, terlebih opsi Yordania semakin digaug-gaungkan oleh sayap kanan Israel, yang tentunya akan menyulitkan terealisasinya solusi dua negara sebagai status akhir tidak akan pernah terjadi.

### **3.1.2 Ancaman Stabilitas Keamanan dari Kelompok Radikalis**

Tidak bisa dipungkiri, bahwa dinamika politik dan berbagai permasalahan regional Timur Tengah pada saat ini berdampak besar bagi monarki Hashemite, terutama dalam konstelasi konflik Israel-Palestina. Hampir tidak ada hari ketika Yordan tidak diingatkan bahwa penyebab utama ketidakstabilan di wilayah ini adalah masalah Palestina.

Konflik Israel-Palestina telah mendatangkan berbagai macam bentuk permasalahan baru yang mewarnai perpolitikan Timur Tengah. Salah satunya adalah kebangkitan kelompok radikalisme atau teroris di kawasan ini. Kedekatan letak geografis Yordania dan khususnya perbatasan yang panjang dengan Israel dan Palestina telah berkontribusi besar terhadap masalah terorisme sepanjang sejarahnya. Selain itu, besarnya populasi pengungsi Palestina menjadikan Yordania sebagai sasaran dari kelompok-kelompok yang menerima aliran pemikiran yang lebih radikal.

Pada dekade 1990-an, Yordania telah menghadapi pertumbuhan organisasi radikal dan perluasan ideologi ekstremis. Hal ini tidak terlepas dari kondisi regional dan domestik pada saat itu mengalami kekacauan.

Kekacauan ini telah menyebabkan kekecewaan besar di antara banyak orang Yordania. Masalah ekonomi, ketidakpastian tentang migrasi masuknya orang-orang Palestina berskala besar yang diusir dari Kuwait karena dukungan PLO untuk rezim Irak selama Perang Teluk, kemudahan koalisi pimpinan Amerika menginvasi Irak pada tahun 1990-91, dengan bantuan beberapa rezim Arab meskipun ditentang secara luas, dan dimulainya proses perdamaian dengan Israel menyebabkan beberapa orang Yordania kehilangan kepercayaan pada rezim mereka. Akibatnya, beberapa pria yang kecewa mulai mencari solusi radikal untuk masalah ini. Sehingga, hal ini mengarah pada munculnya sejumlah kelompok Islamis dengan ide yang samar-samar, tetapi radikal muncul pada awal 1990-an dan terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap orang Kristen, toko minuman keras, klub malam, dan bahkan menyerang para pejabat Yordania (Wagemaker, 2014, p. 61).

Selain itu, kebangkitan narasi al-Qaeda semakin merongrong rezim Arab termasuk Yordania yang dianggap negara yang lalim oleh para kelompok radikal, apalagi pada saat itu pemujaan terhadap terorisme terutama aksi bunuh diri sebagai wujud syahid Islam semakin antusias dilakukan di dunia Arab. Di Yordania sendiri, terorisme bunuh diri pertama kali mendapatkan dukungan selama intifada kedua yaitu pada tahun 2000 di Tepi Barat wilayah pendudukan Israel, di mana banyak simpatisan dari Yordania merasa warga Palestina dibenarkan dalam menggunakan tubuh mereka untuk membawa bom ke sasaran militer dan

sipil Israel ketika menghadapi kekuatan militer yang luar biasa (Speckhard, 2017, p. 12).

Sikap simpatik ini memberikan dampak pada kebangkitan kelompok radikalisme di Yordania yang mengarah pada munculnya kelompok radikal baru. Kelompok takfiri atau radikal baru pada saat itu menganggap Yordania sebagai negara penghianat atau murtad terhadap Islam. Anggapan ini tidak terlepas dari sejarah pendirian Hashemite yang pada sebelumnya telah terlibat dalam pemberontakan Arab. Tokoh komando utama al-Qaeda Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri menganggap pemberontakan Arab terhadap kekaisaran Ottoman selama perang dunia I yang melibatkan keluarga Hashemite merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Islam dan bahwa Hashemite bertanggung jawab atas pengkhianatan ini (Riedel, 2008, p. 27).

Zawahiri mencatat bahwa pemberontakan tersebut merupakan bentuk penghianatan besar terhadap Islam dan sebuah upaya mengatur panggung bagi penciptaan Israel di tanah Palestina. Keterlibatan Hashemite dalam persekongkolan dengan Barat pada tahun 1916 dianggap telah melawan Ummah dalam menentukan nasibnya sendiri. Bagi Zawahiri, ini merupakan tindakan paling jahat yang pernah dilakukan Barat dan sekutunya pemimpin Arab. Seperti yang dikatakan Zawahiri “Ottoman telah mengusir Tentara Salib selama lima abad, dan menghidupkan kembali jihad, itu mengalahkan Konstantinopel, itu membela Palestina. Tetapi kaum Hashem dan Saudi mengkhianatinya dan mengatur panggung bagi penciptaan Israel dan pembagian umat menjadi

negara-negara bajingan yang ditahbiskan oleh Sykes-Picot” (Riedel, 2008, p. 27).

Kebencian kelompok radikal terhadap Hashemite tidak pernah berubah, apalagi kebencian tersebut tidak hanya didasari pada keterlibatan rezim dalam pemberontakan Arab, melainkan lebih pada sikapnya yang moderat dekat dengan Israel dan memiliki hubungan keamanan nasional lama dengan Barat yaitu Amerika. Akibatnya, kebencian kelompok radikal ini mengarah pada pembentukan kekuatan dalam akar rumput Yordania sendiri sebagai bagian dari kelompok radikal. Ini nampaknya berhasil, di mana banyak sekali dari kalangan masyarakat Yordania sebagai partisipan dari kelompok radikal ini, dan lebih parahnya melibatkan orang-orang Tepi Timur yang notabene sebagai kelompok pendukung loyalitas rezim Hashemite. Analisis memperkirakan bahwa pada tahun 2017 Yordania menampung sekitar 6.000 hingga 7.000 simpatisan jihadi, sebagian besar di antara suku-suku timur negara itu. Kelompok-kelompok ini secara tradisional mendukung monarki Hashemite dengan imbalan pekerjaan, tetapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi telah menumbuhkan simpati jihadis di antara populasi yang lebih muda (Nakhoul & Al-Khalidi, 2015).

Salah satu tokoh terorisme utama yang berasal dari Tepi Timur asli adalah Abu Musab al-Zarqawi atau nama aslinya Ahmad Fadhil Nazzal al-Khalaylah adalah tokoh teroris utama yang mendominasi perjuangan antara Yordania dan al-Qaeda hingga kematiannya tahun 2006 di Irak sebagai akibat dari serangan udara AS (Terrill, 2010, p. 125). Zarqawi memiliki historis panjang dalam kegiatan terorisme di Yordania. Ia pernah

terlibat dalam pembunuhan diplomat Amerika Laurence Foley pada Oktober 2002 di Amman, pada tahun 2004 menyerang Direktorat Intelijen Umum Yordania, kantor Perdana Menteri, dan Kedutaan Besar AS di Amman dengan tiga truk yang sarat dengan 20 ton bahan peledak dan racun bahan kimia (Ayasrah, 2009, p. 7). Pada tahun 2005, Yordania juga mengalami tiga pemboman hotel secara bersamaan di Amman, yang juga diorganisir oleh Zarqawi, yang menyebabkan kematian lima puluh tujuh orang dalam insiden ini (Fattah & Slackman, 2005). Selain itu, Zarqawi pernah merencanakan penggulingan rezim Hashemite di bawah organisasi yang disebut *al-Tawhid wal-Jihad*. Gerakan ini mengkampanyekan penolakan terhadap Hashemite yang dianggap sebagai rezim tidak Islami (Rabasa, et al., 2006, p. 140).

Kematian Zarqawi pada 2006, tidak menandakan bahwa Yordania bebas dari ancaman kelompok radikal ini. Memasuki dekade 2011, Yordania semakin mendapati dirinya sedang mengalami ancaman yang begitu nyata, terlebih penetrasi gelombang pengungsi baru dari Suriah ke Yordania menyebabkan negara ini rentan ditumpangi kelompok radikal yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengungsi, namun terkait dengan kelompok militan jihadis seperti kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan al-Nusra. Hal ini tentunya mengakibatkan Yordania semakin rentan terhadap serangan teroris.

Aktivitas terorisme yang dilakukan Zarqawi, telah menginspirasi kelompok radikal lainnya seperti ISIS yang saat kemunculannya mencoba melakukan teror di wilayah Yordania (Robins, 2019, p. 250).

Pada tahun 2015 misalnya, terjadi penangkapan sekaligus pembunuhan seorang Pilot Yordania yaitu Moaz al-Kasasbeh oleh kelompok ISIS yang berada di kota Raqqa, Suriah (Kedmey, 2015). Pada tahun yang sama, juga terjadi sebuah penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tepatnya seorang kapten Polisi Yordania yaitu Anwar Abu Zeid dengan menggunakan sanapan mesin. Dalam insiden tersebut dua kontraktor keamanan Amerika, seorang kontraktor keamanan Afrika Selatan, dan dua warga Yordania menjadi korban (Khalidi, 2015).

Pejabat pemerintah membantah bahwa Abu Zeid telah diradikalisasi, dengan alasan kesehatan mental dan tekanan keuangan. Namun, bukti menunjukkan bahwa Abu Zeid berteriak, 'Allahu Akbar' Saat dia melakukan serangan, dan setelah itu, keluarganya memanggilnya "korban dan syuhada". Demikian pula, selama pemakaman Abu Zeid, ribuan pelayat meneriakkan "Matilah Amerika, Matilah Israel". Akun Twitter juga meledak dalam perayaan pembunuhan tersebut, memuji Abu Zeid sebagai "martir" dan menyerukan lebih banyak serangan serigala terhadap pejabat Amerika dan Yordania (Speckhard, 2017, p. 18).

Aksi teror ini kembali muncul pada tahun 2016, ketika seorang teroris memasuki gedung Direktorat Intelijen Umum di kamp pengungsi Palestina di Baqqa dan menewaskan lima petugas. Pada akhir tahun yang sama, di Yordania selatan, para jihadis Yordania yang telah kembali dari pertempuran di Suriah membunuh warga sipil, pasukan keamanan, dan orang asing serta memiliki rencana untuk menyerang sasaran pada malam tahun baru (Alshoubaki & Harris, 2018, p. 166).



Dalam kasus Yordania, kelompok utama yang beroperasi dan meradikalisasi orang Yordania menjadi ekstremisme kekerasan saat ini adalah kelompok jihadis militan yang beroperasi di Suriah, terutama ISIS dan Jabhat al-Nusra. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok teroris Palestina telah bertahun-tahun meletakkan dasar untuk menerima ideologi al-Qaeda dan ISIS dengan mudah. Ironisnya, orang-orang Palestina di Yordania menjadi bagian dalam mendukung ideologi radikal ini (Speckhard, 2017, p. 21). Sehingga, dalam hal ini selain dari pada kelompok radikal luar dari pada palestina, kelompok radikal ini juga datang dari dalam perjuangan Palestina itu sendiri, Pemimpin aliran kiri dari organisasi PFLP yaitu George Habash selama dekade 1960-an misalnya, telah mempertahankan platform politiknya untuk menyerukan penggulingan rezim Hashemite. Platform politik PFLP, yang sangat dipengaruhi oleh perjuangan Vietnam Utara melawan Amerika Serikat, menyatakan bahwa Amman perlu menjadi "Arab Hanoi" untuk menghadapi dan mengalahkan Israel (Terrill, 2010, p. 124).

Selain itu, ancaman ini datang dari kelompok gerakan pejuang Palestina lainnya yaitu HAMAS (*Harakat al-Muqawama al-Islamiyyah*). HAMAS dikenal sebagai organisasi radikal Muslim Paslestina, dalam komunitas internasional kelompok ini dikenal sebagai kelompok militan yang kegiatannya meliputi aksi terorisme seperti bom bunuh diri. Berkaitan dengan stabilitas keamanan Yordania, HAMAS dianggap sebagai kelompok yang membahayakan rezim Hashemite. Yordania takut

pada HAMAS karena kelompok ini bisa saja membangkitkan ekstremisme Islam di negara mereka sendiri.

Hubungan HAMAS dan Yordania pada awalnya menjalin kerjasama antara satu dengan lainnya sebagai penyeimbang terhadap ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh Otoritas Palestina. Bahkan di bawah raja Hussein, HAMAS memiliki kantor informasi di Amman selama enam tahun. Selain itu, ia memiliki kemewahan lima kantor perwakilan di Yordania, dikelola oleh sembilan belas aktivis penuh waktu, dan dipimpin oleh Khalid Mish'al, dan juru bicara utamanya, Ibrahim Ghoshah, keduanya warga Yordania asal Palestina. Yang pertama kemudian menjadi pemimpin HAMAS selama hampir dua puluh tahun berikutnya (Robins, 2019, p. 247).

Namun, hubungan keduanya mengalami ketegangan bahkan menjadi musuh, hal ini diakibatkan bahwa HAMAS pada saat itu menentang keras proses perjanjian perdamaian antara Yordania dan Israel. HAMAS menganggap perjanjian tersebut tidak jauh beda dengan proses perdamaian Oslo antara PLO dan Israel, sehingga secara langsung HAMAS menyatakan oposisi terhadap hubungan Yordania dengan Israel (Kumaraswamy, 2001). Ketegangan ini berlanjut ketika HAMAS menggunakan kantor Yordania mereka sebagai pos komando untuk kegiatan militer di Tepi Barat dan Gaza pada tahun 1999 (Bitannica.com, 2019). Melihat hal tersebut Yordania di bawah kepemimpinan raja Abdullah II, langsung mengusir beberapa pemimpin HAMAS, yang dipimpin oleh Khalid Masha'al keluar dari Yordania, selain itu Yordania

juga menutup kantor cabang HAMAS di Amman dan melarang aktivitas HAMAS di wilayah Yordania (Chen, 2010, p. 106). Rwabda perdana menteri Yordan pada saat itu mengatakan, “Siapa pun yang ingin mengatur oposisi terhadap negara Arab lain di wilayah Yordania harus pergi ke negara itu dan mengatur kekuatan mereka di sana” (Kumaraswamy, 2003, p. 121).

Bagaimanapun, Yordania dan HAMAS saling berhadapan di dua kubu regional yang antitesis, Yordania di antara yang disebut moderat dan HAMAS di kubu yang disebut kamp perlawanan. Perbedaan ini tentu memiliki pengaruh pada hubungan kedua entitas ini, terlebih pada masalah keamanan Yordania itu sendiri. Menurut komunitas keamanan Yordania, masalah keamanan akibat upaya HAMAS untuk menyimpan dan menyeludupkan senjata ke tanah Yordania merupakan masalah strategis bagi stabilitas keamanan Yordania (Rantawi, 2009). Sehingga, sampai sekarang hubungan Yordania dan HAMAS tidak kunjung baik, seorang pejabat Yordania yang menolak untuk mengungkapkan namanya mengatakan, “Bahwa Hamas tidak akan ada lagi di wilayah Yordania, masa lalu sudah berakhir dan tidak akan dipulihkan” (Chen, 2010, p. 116-117).

Pergerakan kelompok radikal baik luar atau dalam perjuangan gerakan Palestina, tentu merupakan sebuah tantangan besar bagi Yordania dalam melindungi kelangsungan stabilitas keamanannya. Untuk itu, Yordania melakukan dukungan terhadap penciptaan Palestina yang independen sebagai bagian upaya untuk membendung berbagai ancaman

tersebut. Pembentukan negara Palestina yang independen adalah prioritas keamanan utama bagi Yordania, seperti halnya untuk keamanan regional dan internasional, dan prasyarat untuk aliansi di masa depan (Pedatzur, 2013, p. 114). Selain itu, bagi Yordania, penciptaan negara Palestina yang independen adalah penting karena ini setidaknya bisa memobilisasi berbagai macam gerakan kelompok radikal terutama terhadap para pengungsi Palestina di Yordania yang notabene sebagai partisipan terbanyak dari kelompok ini. Para pengungsi ini diharapkan kembali ke tanah kelahirannya setelah penciptaan Palestina yang independen, dan itu memungkinkan terjadinya pengurangan gerakan kelompok radikal yang akan berdampak pada peningkatan keamanan stabilitas Yordania sendiri dan kawasan pada umumnya. Hal ini sejalan dengan sikap entitas Palestina, di mana presiden Palestina untuk saat ini yaitu Mahmoud Abbas mengatakan bahwa negara Palestina merdeka dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya adalah kunci keamanan, perdamaian dan stabilitas di kawasan (Dailysabah.com, 2016).

Namun perlu diingat, di sini Yordania bukanlah dalam posisi yang sangat begitu mudah, melainkan Yordania berada pada posisi yang begitu dilematis dalam menghadapi permasalahan ini. Kedekatannya dengan barat yaitu Amerika telah memberikan banyak kontribusi atas kelangsungan rezim Hashemite. Di samping itu, hubungannya dengan Israel nampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun selama ini hubungan kedua negara pasca perdamaian pada tahun 1994 nampak tidak memiliki peningkatan yang signifikan atau mengalami hubungan yang

dingin, bagi Yordania Israel merupakan rekan yang sangat begitu penting, tanpa kontrol Israel atas Tepi Barat, kemungkinan ini akan menjadi kesempatan bagi kelompok radikal Palestina untuk menyusun kekuatan baru yang kemungkinan akan berdampak pada penggulingan rezim Hashemite (Krasna, 2020). Terlepas dari itu, Yordania tetap dalam posisi yang moderat seolah menggambarkan kenetralannya tanpa memihak siapapun dan bahkan Yordania menjadi juru kunci dalam keterlibatannya memperjuangkan solusi dua negara sebagai status akhir konflik antara Israel dan Palestina. Untuk itu, skenario Yordania adalah negara Palestina yang stabil dan damai di Tepi Barat dan Gaza, yang akan mempertahankan hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Yordania dan hidup dalam damai dengan Israel dan tetangga Arab lainnya.

### **3.1.3 Kondisi Perpolitikan Timur Tengah**

Selain mempertimbangkan kondisi yang berlaku di internal domestik atau nasionalnya, Yordania juga mempertimbangkan kondisi di internal kawasan Timur Tengah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, dimulai pada dekade 1990-an terjadi berbagai dinamika kekacauan baik internal maupun regional yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan di kawasan. Perang saudara, dari Suriah hingga Irak, Libya, Yaman, Somalia dan sebelumnya, Libanon, Sudan dan Aljazair, bahkan negara Arab saling memusuhi antara satu dengan lainnya, ini terlihat jelas pada perselisihan yang terjadi antara negara-negara teluk. Semua kekacauan dan perselisihan ini hanya berakhir untuk kemudian kembali berkecamuk.

Ritme ini juga terjadi di dalam realitas internasional. Meskipun perang dingin sudah usai, namun hal ini tidak menghalangi keikutsertaan negara-negara adidaya dalam memberikan dukungan politik dan material yang semakin memperparah keberlanjutan konflik. Dan sekarang realitas ini terjadi, di mana negara-negara yang dikenal sebagai negara adidaya belum menggunakan statusnya untuk memanfaatkan kesepakatan yang adil dan komprehensif dalam mengakhiri konflik ini.

Kekacauan ini terus menghiasi perpolitikan kawasan sampai sekarang. Yordania dalam hal ini melihat bahwa situasi dan kondisi Timur Tengah yang mengalami carut-marut penuh dengan perpecahan, tidak bisa diandalkan dalam proses perdamaian Timur Tengah. Bahkan, ini dilihat sebagai salah satu bagian besar penghambat jalannya proses perdamaian dalam konflik ini.

Arab Saudi pun yang dipandang oleh Yordania sebagai negara yang tidak memiliki permasalahan, didukung dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah dalam hal ini minyak, juga tidak bisa diandalkan dalam proses perdamaian ini. Meskipun dalam kenyataannya Saudi memprakarsai API pada tahun 2002 dalam proses perdamaian Timur Tengah, namun tidak bisa dipungkiri semua itu merupakan bagian dari kepentingan bersama antara Israel dan negara-negara Arab moderat sehubungan dengan ambisi regional Iran (Bahgat, 2007, p. 48).

Realitas internasional pun demikian, Amerika yang dikenal sebagai negara adidaya sampai sekarang tidak pernah memanfaatkan status tersebut dalam mencapai kesepakatan, malahan sebaliknya menghadirkan

ketidakadilan tanpa malu-malu mencerminkan posisinya mengarah pada dukungannya ke satu pihak yaitu Israel. Hal ini tergambar dari berbagai hak veto yang digunakan AS dalam keanggotaannya di PBB untuk melindungi kepentingan Israel. Sejak pendirian PBB pada tahun 1945, tercatat AS telah melakukan 80 kali veto terhadap resolusi DK PBB (Tawil, 2017). Dari jumlah sebanyak itu, 43 kalinya AS menggunakan hak vetonya untuk mengeluarkan resolusi guna melindungi Israel (middleeasteye.net, 2017).

Dalam perkembangannya, tepatnya pada tahun 2017, AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump secara radikal mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Trump beranggapan bahwa, “Mengakui Yerusalem, merupakan langkah yang selama ini tertunda untuk memajukan proses perdamaian antara Israel-Palestina” (Landler, 2017). Kebijakan yang kontroversial ini kembali dilakukan AS, di mana Trump kembali mengeluarkan sebuah rancangan yang disebut Kesepakatan Abad Ini (*Deal of Century*) yang disusun AS untuk menyelesaikan konflik antara Israel-Palestina. Arab Saudi dalam hal ini merespon positif rancangan ini dan bahkan Saudi dan negara Teluk lainnya berkomitmen untuk mendanai rancangan ini sebagai bentuk dukungan dalam mengakhiri konflik (middleeastmonitor.com, 2020).

Tentu, Yordania khawatir akan situasi dan kondisi ini, terlebih mengenai kesepakatan abad ini. Rancangan tersebut dipandang Yordania sebagai ketidakadilan terhadap Palestina, dan berbanding terbalik terhadap apa yang diharapkan dalam solusi dua negara. Menyikapi ini, Yordania

dengan tegas menolak semua rancangan tersebut, dan dunia internasional harus kembali pada solusi dua negara dan inisiatif perdamaian Arab sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian yang adil dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina, tanpa merujuk langsung pada proposal Trump (Sharif, 2020).

Melihat sikap Yordania, Saudi langsung memberikan tekanan terhadap Yordania dengan membangkitkan kembali perdebatan lama yaitu mengenai hak status istimewa dalam penjagaan situs-situs suci Islam, dalam hal ini Saudi menolak status istimewa Yordan terhadap perwaliannya atas situs suci di al-Quds Yerusalem. Raja Abdullah telah mengisyaratkan bahwa hubungan Amman dan Riyadh sedang mengalami ketegangan mengenai masalah ini, dengan mengatakan bahwa ia telah mendapat tekanan untuk mengubah posisinya di Yerusalem yang diduduki (Amer, 2019). Tekanan tersebut tidak lain terkait dengan hubungan persahabatan AS dan Saudi serta keinginan AS untuk memenangkan dukungan arab terhadap rencana perdamaian Timur Tengahnya, dengan menjadikan isu perwalian situs suci di Yerusalem sebagai alat legitimasi dalam mengubah posisi Yordania supaya menyetujui dan mendukung rencana perdamaian tersebut (Jalal, 2018).

Perpolitikan kawasan yang carut-marut serta absennya sebagian negara Arab dan realitas internasional dalam memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, merupakan tugas yang berat bagi pembuat kebijakan regional dan internasional dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Bahkan dalam skenario optimis, kemajuan



menuju deeskalasi dan stabilitas kemungkinan besar akan meningkat, lambat, dan tidak merata. Meskipun demikian, Yordania terus memainkan peran positif dan mengambil peran penting dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini, yaitu tetap konsisten menawarkan solusi dua negara dan berusaha untuk netral dalam mengakhiri konflik ini. Yordania dalam hal ini, tidak ingin ikut berlarut-larut dalam dinamika perpecahan yang terjadi di Timur Tengah, yang tentu akan berdampak pada tidak terrealisasinya proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan Yordania. Untuk itu, Yordania berusaha memainkan manuver baru untuk menjaga kepentingannya, di mana Yordania mencoba mengambil jarak dari mitra lama Teluk Arab dengan semakin dekat ke Qatar dan Turki dan menempatkan dirinya di jalan tengah tidak memihak kubu satu dengan lainnya (Gavlak, 2019).

Peran ini juga di lihat Yordania sebagai kesempatan untuk menjadikan Yordania sebagai negara yang cukup berpengaruh di regional Timur Tengah, meskipun secara sederhana dalam hal bobot, baik populasi, kemampuan ekonomi dan kekuatan militernya, tidak memungkinkan negara ini menjadi *leader* di kawasan. Namun, pada kondisi ini Yordania tidak mengedepankan keegoisannya dalam mencapai kepentingannya, ini dikarenakan masih terdapat negara-negara yang lebih besar kekuatannya yang memainkan pengaruh untuk menempati posisi penting di Timur Tengah, salah satunya adalah Turki.

Turki dalam hal ini salah satu negara Timur Tengah yang masih memiliki ambisi besar dalam memainkan politik regional di kawasan.

Spirit mengembalikan masa kejayaan Osmani (Ottoman) merupakan salah satu bagian memotivasi Turki untuk memainkan manuver politik luar negerinya di kawasan. Namun, Yordania tidak ambil pusing pada kondisi ini, bahkan Yordania menjalin kerjasama dengan Turki dalam mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina (Pengying, 2018). Turki dalam hal ini sangat mendukung Yordania dan peran regionalnya, selain itu Turki mendukung peran bersejarah Yordania sebagai pemelihara tempat-tempat suci di Yerusalem. Kedua negara ini telah berbagi kepentingan dalam menanggapi isu Palestina. Bagi Turki, perjuangan terhadap Palestina merupakan prahara yang lebih utama daripada masalah Timur Tengah lainnya. Ini karena dimensi historis dan ideologis yang mendalam dari materi di mata rakyat Turki. Dengan demikian, kebijakan Ankara terhadap Palestina mencerminkan denyut nadi politik domestik dan keseimbangan masyarakat Turki. Tentu, ini juga berlaku pada Yordania bahwa masalah Palestina adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan strategis regional Amman (Cengiz, 2019).

Pada saat yang sama, hubungan Yordania dan Turki semakin intens, terutama dalam menjalin kerjasama ekonomi. Turki dalam hal ini tidak pernah mengecewakan Yordania dalam masalah ekonomi atau politik apa pun, itu karena Turki memainkan peran penting di kawasan dan adalah yang terdekat dan paling jujur dan aman bagi Yordania, di sisi persamaan agama, sejarah, dan kesamaan budaya dan tradisi antara keduanya memainkan peran penting dari hubungan baiknya selama ini

(Alkaed, 2019, p. 21). Sehingga, peran Turki yang selama ini memainkan peran penting di kawasan bukan dianggap sebuah ancaman oleh Amman. Di sisi lain, Turki telah membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah yang paling setia kepada pemerintah Yordania dan rakyat Yordania.



## **BAB IV : PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Solusi dua negara bukanlah solusi yang baru, melainkan opsi yang sudah lama muncul bahkan sejak awal terjadinya konflik antara Israel dan Palestina. Komunitas internasional melihat peliknya konflik, telah menjadikan solusi dua negara sebagai pilihan dalam meredakan konflik ini. PBB selaku otoritas internasional pada saat itu mengeluarkan resolusi partisi untuk mengakhiri konflik, yaitu merujuk pada pembagian tanah Palestina menjadi dua bagian.

Berkaitan dengan ini, Yordania selaku negara yang berdekatan langsung dengan Israel dan Palestina telah mendukung paradigma ini sebagai solusi akhir dalam konflik. Dukungan Yordania yang konsisten terhadap solusi dua negara berdasarkan batas sebelum 1967 sebagai solusi akhir dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina, merupakan sebuah upaya jalan tengah yang diambil Yordan dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Keterlibatan Yordania dalam konflik ini didasari karena adanya kedekatan historis, geografis dan realitas demografis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab 1, bahwa kedekatan geografis dan realitas demografis membuat Yordania hampir tidak mungkin lolos dari dampak potensial dari konflik, serta penyelesaian apa pun yang terkait dengan masalah Palestina. Selain itu, keterlibatan Yordania dalam konflik juga didasari karena adanya ikatan historis yang begitu kuat antara Yordania dan Palestina. Keterlibatan ini tentu tidak terlepas dari kedatangan raja pertama Yordania yaitu raja Abdullah ke tanah Palestina. Sebagaimana yang sudah tercantum pada bab II, bahwa raja Abdullah pada saat itu melihat kurangnya

perlawanan dari bangsa Arab terhadap invansi Zions Israel terhadap tanah Palestina, membuat Abdullah merasa bertanggung jawab dengan keadaan itu. Abdullah mengatakan bahwa “Karena orang-orang Palestina telah membatasi diri untuk melakukan protes, saya telah menganggapnya sebagai kewajiban saya di bawah agama saya yang menurut saya sebagai tanggung jawab saya menyembah Tuhan dan sebagai sesuatu yang diperintahkan kepada saya oleh afiliasi ras saya, untuk berusaha menangkal bencana dengan membawa persatuan Palestina dan Transyordan”.

Namun terlepas dari itu, keterlibatan raja Abdullah dalam konflik ini membawa visi yang besar yaitu bertujuan untuk menciptakan “Suriah Raya” yaitu menyatukan bangsa Arab di bawah bendera Hashemite-Nya. Akan tetapi Abdullah menyadari bahwa keinginannya itu tidak mungkin terjadi karena ia adalah seorang Hijaz yang tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk mendirikan suriah raya dibawah benderanya. Sehingga dalam hal ini, Abdullah mengubah tujuannya dan melirik tanah Palestina dengan harapan bisa membawanya ke dalam pangkuan Hashemite, dan itu berhasil pada tahun 1950 wilayah Tepi Barat menjadi bagian dari kerajaan Hashemite. Semenjak itulah keterlibatan Yordania dalam konflik ini semakin inten hingga sekarang.

Meskipun demikian, hubungannya dengan Palestina sering mengalami pasang surut. Kebangkitan nasionalis Arab Palestina yaitu PLO setelah perang 1967, telah mengubah kerangka pemikiran kebijakan Yordania terhadap masalah Palestina. Hal ini didasari karena adanya perbedaan antara Yordania dan PLO dalam menyikapi masalah Palestina. PLO dalam hal ini lebih mengutamakan taktik gerilya ketimbang menempuh jalan diplomasi seperti yang di tempuh

Yordania. Perbedaan ini juga terlihat jelas dari tujuan akhir yang mereka inginkan, di mana PLO berusaha untuk memobilisasi segala cara yang mungkin untuk membebaskan seluruh tanah Palestina, sedangkan Yordan ingin kembali pada pemukiman yang akan menjamin pemulihan tanah yang hilang pada tahun 1967. Perbedaan ini mendatangkan perpecahan antara PLO dan Yordania, terlebih ditambah dengan adanya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak semakin memperparah hubungan antara keduanya, puncaknya pada 1970-71, yang dikenal dengan peristiwa Black September. Peristiwa ini tentu mendatangkan skeptis bagi Yordan terhadap Palestina yang dianggap tidak berterimakasih atas perlakuan baik Yordania terhadapnya. Pada KTT Rabat tahun 1974, PLO akhirnya diakui sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Selain itu, konstelasi perpolitikan Timur Tengah yang tidak memihak semakin mengebiri peran Yordania, terutama slogan Likud "*Jordan is Palestine*" yang semakin menambah kedilemaan Yordan. Oleh karenanya, Yordan langsung beralih pada strategi preventif untuk melindungi kepentingan vitalnya, dan secara bersamaan melepaskan diri secara administratif dan legal dari Tepi Barat pada tahun 1988.

Lepasnya Tepi Barat, tidak membuat Yordania berhenti memperhatikan masalah Palestina. Akan tetapi, Yordan kembali melirik konflik kedua blok ini dengan kerangka yang berbeda, yaitu mendukung solusi dua negara sesuai batas tanah sebelum tahun 1967 sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.

Seperti halnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara pada umumnya, kebijakan Yordania yang konsisten mendukung solusi dua negara sesuai batas tanah sebelum tahun 1967 sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan

konflik, tidak terlepas dari kepentingan Yordania itu sendiri. Jika dilihat dari kacamata *Decision Making* sebagai mana yang sudah di jelaskan dalam bab II dan bab III, terdapat faktor-faktor yang dominan mempengaruhi Yordania tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai solusi akhir. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu Faktor internal (*Internal Setting*) dan faktor eksternal (*Eksternal Setting*).

Sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa faktor internal mempertimbangkan bagaimana keadaan domestik suatu negara mendorong negara tersebut untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan internal negara tersebut. Seperti halnya Yordania, di mana kondisi internal domestik kerajaan telah mendorong negara itu untuk mengeluarkan kebijakan yang tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai status akhir, dalam hal ini berbagai aspek dominan yang sudah di jelaskan pada bab II, menjadi bagian faktor pertimbangan Yordania. Adapun faktor tersebut; Pertama, adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik Yordania, dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya pengungsi akibat konflik Israel-Palestina berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi dan politik Yordania. Terlebih Yordania sebagai negara kecil dan miskin dalam hal sumber daya, serta pendapatan internal terbatas, dan basis prekonomian berorientasi pada eksternal, membuat Yordania sangat rentan dilanda krisis politik dalam perpolitikan nasionalnya. Begitupun juga pada kehidupan sosial Yordania, masuknya pengungsi telah mengubah komposisi demografis Yordania sehingga pada saat ini bisa dilihat setengah dari populasi Yordania didominasi oleh orang-orang Palestina. Kedua, adalah pengaruh dari berbagai kelompok kepentingan, dalam hal ini penulis maksud adalah suku-suku asli Yordania yaitu suku bedouin.

Para suku ini dikenal sebagai kelompok loyalis rezim hashemite yang selama ini menopang kerajaan. Para suku ini tidak menginginkan kehadiran orang Palestina di tengah rezim, mereka menganggap kehadiran orang Palestina tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi para suku dalam rezim Hashemite. Sehingga, para suku ini selalu menekan pemerintah untuk mengupayakan pengusiran terhadap orang-orang Palestina di Yordania dengan dalih semua itu merupakan upaya pemenuhan hak terhadap para pengungsi untuk kembali ke tanah kelahirannya, dalam hal ini pemerintah selalu tetap mengusung solusi dua negara sebagai solusi akhir. Ketiga, adalah pengaruh ideologi, dalam hal ini ideologi yang berkembang di Yordania pada saat ini adalah ideologi nasionalis. Munculnya ideologi ini tidak lain sebagai reaksi terhadap ancaman Palestina yang dirasakan terhadap identitas Transyordania yang berasal dari para pengungsi yang masih menyeberang ke Yordania. Masuknya para pengungsi Palestina semakin memperumit demografis Yordania tentu shal ini akan berdampak besar bagi kelangsungan rezim. Terlebih kebangkitan para nasionalis ini juga disebabkan adanya pengalaman fil pahit yang pernah dirasakan di masa lalu, yaitu terjadinya pemberontakan yang dilakukan orang Palestina terhadap rezim Hashemite yang dikenal sebagai Black September.

Sedangkan pada faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Yordania tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai status akhir, di lihat dari keadaan internasionalnya, dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah itu sendiri. Jika ditinjau dari faktor eksternal, terdapat tiga faktor utama yang penulis sudah klasifikasikan mengapa Yordania tetap konsisten pada solusi dua negara. Pertama, adalah adanya wacana Yordania dijadikan tanah air alternatif bagi orang-orang Palestina "*al-Watan al-Badil*" atau "*Jordan is Palestine*".



Slogan yang gaungkan oleh Likud ini tidak bisa dipungkiri telah menjadi ketakutan dan mimpi buruk yang selama ini menghantui rezim Hashemite. Slogan ini telah membawa opini besar penuh dengan kontroversial bagi Hashemite, yaitu menganggap tanah Yordania sebagai bagian wilayah integral Palestina. oleh karenanya, Israel beranggapan bahwa Yordania tidak perlu didirikan lagi di Yerusalem karena negara Palestina sudah ada di Yordania di mana mereka menjadi mayoritas di sana. Oleh karena itu, penulis menganggap bawa slogan tanah air alternatif ini menjadi salah satu faktor pemicu utama Yordania tetap pada solusi dua negara. Kedua, adalah faktor keamanan yaitu ancaman dari berabagai kelompok radikal. Tidak bisa dipungkiri, banyaknya kelompok radikal yang berkembang di Timur Tengah merupakan efek dari konflik Israel-Palestina. Para kelompok radkalis ini menganggap bahwa tanah Palestina yang sedang diduduki oleh Israel harus kembali kepangkuan Arab, sehingga semua bentuk kerjasama dengan Israel maupun sekutunya Amerika merupakan sebuah pengkhianatan bagi Islam, dan ini berlaku terhadap Yordania. Para kelompok radikal melihat bahwa Yordania merupakan negara yang dekat dengan Israel dan Barat, anggapan ini juga tidak terlepas dari jejak historis masa lalu, di mana keluarga Hashemite ikut terlibat dalam penggulingan dinasti Ottoman, keterlibatan Yordania ini seperti yang dikatakan oleh Tokoh komando utama al-Qaeda Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Islam dan bahwa Hashemite bertanggung jawab atas pengkhianatan ini. Tentunya ini merupakan ancaman bagi Yordania yang akan berdampak pada stabilitas keamanan Yordania itu sendiri. Ketiga, adalah faktor kondisi perpolitikan Timur Tegah yang mengalami carut-marut penuh dengan perpecahan, tidak bisa diandalkan dalam

proses perdamaian Timur Tengah. Sehingga dalam hal ini Yordania merasa termotivasi pada kondisi ini untuk menjadi satu-satunya negara yang bertanggung jawab dalam memperjuangkan status akhir dalam perdamaian Israel-Palestina.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil analisis dan pemaparan kesimpulan di atas, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan harus dilakukan pengembangan ke depan sebagai kelanjutan dari penelitian ini. Terkait saran penelitian, penulis mengajukan beberapa opsi kepada para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis pada saat ini. Opsi-opsi tersebut diantaranya:

- Pengkajian secara teoritis mengenai konsistensi kebijakan Yordania terkait solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina dengan menggunakan teori konstruktivisme.
- Pengkajian terkait layaknya solusi dua negara sebagai solusi akhir dalam konflik Israel-Palestina.
- Pengkajian terkait atas respon berbeda negara-negara Arab dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Namun sebelumnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pembelajaran terkait analisis faktor penyebab sebuah kebijakan dikeluarkan oleh negara dalam menyikapi sebuah fenomena yang ada. Pembelajaran ini penting untuk diketahui, karena dengan ini para analisis bisa mengetahui kepentingan dan tujuan yang dimiliki oleh sebuah negara dibalik kebijakan yang dikeluarkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (1978). *My Memoirs Completed*. London: Longman.
- Ayasrah, A. (2009). *Jordan Stands at the Front Line of Combating Terrorism*. Carlisle: U.S. Army War College.
- Abudayeh, S. (1995). The Middle East Peace Process 1948-1994: Constraints and Prospects. *Pakistan Horizon*, Vol. 48, No. 4, 27-41.
- Alshoubaki, W., & Harris, M. (2018). The impact of Syrian refugees on Jordan: A framework for analysis. *Journal of International Studies*, 11 (2) , 154-179.
- Almomani, H. M. (2012). Evaluating Peace Agreements: The Jordanian-Israeli Peace Treaty of 1994, 16 Years Later: A Jordanian Perspective. *Jordan Journal of Social Sciences*, Vol 5, No. 3, 500-514.
- Alkaed, A. (2019). The Economic Crisis in Jordan and the Turkish Position for Supporting Jordan. *International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, Vol. 6, No. 6, 15-26.
- Althbutat, Q., & Ghawanmeh, N. (2014). The position of the Islamic Action Front of the political process in the period (1993-2013) in Jordan. *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol.4, No.9, 180-185.
- Amer, A. A. (2019, November 11). *The scramble for Jerusalem: Saudi Arabia, Jordan, Turkey and Morocco are all vying for authority over Islam's third holiest place*. Dipetik April 20, 2020, dari Al-Jazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/scramble-jerusalem-190510200333480.html>
- Aljazeera.com. (2019, September 11). *Netanyahu announces post-election plan to annex Jordan Valley*. Dipetik May 23, 2020, dari Al-Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/netanyahu-announces-post-election-plan-annex-jordan-valley-190910155523634.html>
- Brown, N. J. (2006). *Jordan And Its Islamic Movement: The Limits of Inclusion?* Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Bondokji, N. (2015). *The Muslim Brotherhood in Jordan: Time to Reform*. Washington, D.C: Brookings Institution.
- Barari, H. A. (2009). *The Middle East Peace by Piece: The Quest For a Solution to the Arab-Israeli Conflict*. Amman: Friedrich.
- Barari, H. A. (2014). *Jordan and Israel: A Troubled Relationship in a Volatile Region*. Amman: Friedrich Ebert Stiftung Jordan & Iraq.
- Barari, H. A. (2008). Four Decades after Black September: A Jordanian Perspective. *Civil Wars*, Vol.10, No.3, 231-243.
- Barari, H. A. (2019). Jordan's Options in the Wake of the Failure of the Two-State Solution. Dalam D. Fakoussa, & L. L. Kabis, *Socio-Economic Challenges and Jordan's Foreign Policy: Employment, Trade, and*

- International Cooperation - Perspectives from the Region and Europe* (hal. 127-133). German Council on Foreign Relation.
- Brand, L. A. (1995). Palestinians And Jordanians: A Crisis of Identity. *Journal of Palestine Studies*. V. XXV, No. 4, 46-61.
- Bookmiller, R. J. (1997). Likud's Jordan Policy . *Middle East Policy*, Vol. V, No. 3, 90-103.
- Bahgat, G. (2007). Saudi Arabia And The Arab-Israeli Peace Process. *Middle East Policy Council*, Vol. 14 , 49-59.
- Bacik, G. (2008). *Hybrid sovereignty in the Arab Middle East, The Cases of Kuwait, Jordan, and Iraq*. New York: Palgrave Macmillan.
- Banimelhem, G. S. (2008). Jordan's Policy towards the Peace in the Middle East. *Dirasat, Human and Social Sciences*, Volume 35, No. 1, 127-136.
- Britannica.com. (t.thn.). *Two-state solution: Israel-Palestine History*. Dipetik Murch 19, 2020, dari Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/two-state-solution>
- Britannica.com. (2019, January 15). *Hamas Palestinian nationalist movement*. Dipetik May 24, 2020, dari Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Hamas>
- Bahour, S. (2001, May 1). *Israel's Jordan is Palestine Option*. Dipetik April 23, 2020, dari Institute for Policy Studies : [https://ips-dc.org/israels\\_jordan\\_is\\_palestine\\_option/](https://ips-dc.org/israels_jordan_is_palestine_option/)
- Carter, J. (2010). *Merengkuh Prdamaian Di Kota Suci: Rencana Besar Yang Harus Dilaksanakan*. Diterjemahkan oleh: Purwosusanto. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Chen, T. (2009). Palestinian Refugees in Arab Countries and Their Impacts. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)* Vol.3, No. 3, 42-56.
- Chen, T. (2010). Support or Hostility: the Relationship between Arab Countries and Hamas. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 100-120.
- Chatelard, G. (2010, August 31). *Jordan: A Refugee Haven*. Dipetik Murch 15, 2020, dari Migration Policy Institute: <https://www.migrationpolicy.org/article/jordan-refugee-haven/>
- Cengiz, S. (2019, February 8). *Turkey and Jordan united by regional crises*. Dipetik May 24, 2020, dari Arab News: <https://www.arabnews.com/node/1449111>
- Champion assassinator*. (2020, January 16). Dipetik April 26, 2020, dari Weekly Worker: <https://weeklyworker.co.uk/worker/1282/champion-assassinator/>
- Dwyer, C. (2017, December 6). *How The World Is Reacting To Trump Recognizing Jerusalem As Israel's Capital*. Dipetik March 9, 2020, dari National Public Radio: <https://www.npr.org/sections/thetwo->

- way/2017/12/06/568748383/how-is-the-world-reacting-to-u-s-plan-to-recognize-jerusalem-as-israeli-capital.
- DeYoung, K., Eglash, R., & Balousha, H. (2018). *U.S. ends aid to United Nations agency supporting Palestinian refugees*. Dipetik Murch 12, 2020, dari washingtonpost: [https://www.washingtonpost.com/world/middle\\_east/us-aid-cuts-wont-end-the-right-of-return-palestinians-say/2018/08/31/8e3f25b4-ad0c-11e8-8a0c-70b618c98d3c\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-aid-cuts-wont-end-the-right-of-return-palestinians-say/2018/08/31/8e3f25b4-ad0c-11e8-8a0c-70b618c98d3c_story.html)
- David, A. (2010, June 16). *The revolt of Jordan's military veterans*. Dipetik April 20, 2020, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2010/06/16/the-revolt-of-jordans-military-veterans/>
- Dailysabah.com. (2016, Murch 10). *Two-state solution key to defeating terror, Palestinian President Abbas says*. Dipetik May 27, 2020, dari Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/mideast/2016/03/10/two-state-solution-key-to-defeating-terror-palestinian-president-abbas-says>
- Frisch, H. (2004). Jordan and the Palestinian Authority: Did Better Fences Make Better Neighbors? *Middle East Journal*, Vol. 58, No. 1, 52-71.
- Fattah, H. M., & Slackman, M. (2005, November 10). *3 Hotels Bombed in Jordan; At Least 57 Die*. Dipetik May 25, 2020, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2005/11/10/world/middleeast/3-hotels-bombed-in-jordan-at-least-57-die.html>
- Fanack.com. (2018, Oktober 30). *Governance & Politics of Jordan*. Dipetik Murch 10, 2020, dari Fanack: <https://fanack.com/jordan/governance-and-politics-of-jordan/>
- Gallets, B. (2015). Black September and Identity Construction in Jordan. *Journal of Georgetown University-Qatar Middle Eastern Studies Student Association*, 1-9.
- Gavlak, D. (2019, August 16). *Jordan Seeks Middle Ground in Mideast Rift*. Dipetik May 25, 2020, dari VOA News: <https://www.voanews.com/middle-east/jordan-seeks-middle-ground-mideast-rift>
- Hara, A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Hadi, A., Ahmad, Omar, & Bahjat. (2016). *Nationalism in the Middle East: The development of Jordanian national identity since the disengagement of 1988*. Durham: Durham University.
- HRW. (2010, February 1). *Jordan: Stop Withdrawing Nationality from Palestinian-Origin Citizens*. Dipetik Murch 13, 2020, dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/4b6aba291c.html>
- IMEMC. (2019, Jun 21). *PCBS Report : 6 Million Palestinians Registered as Refugees with UNRWA in 2018*. Dipetik March 15, 2020, dari IMEMC News: <https://imemc.org/article/pcbs-report-6-million-palestinians->

- registered-as-refugees-with-unrwa-in-2018/#:~:text=PCBS%20Report%20%3A%206%20Million%20Palestinians%20Registered%20as%20Refugees%20with%20UNRWA%20in%202018,-Jun%2021%2C%202019&text=On%20June%202
- Jarbawi, A. (1995). The Triangle of Conflict. *Foreign Policy*. Vol. 92, No. 100, 92-108.
- Jalal, R. A. (2018, July 7). *Is Riyadh really pushing for control of Jerusalem holy sites ?*. Dipetik April 20, 2020, dari Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals/2018/07/saudi-arabia-holy-sites-jordan-jerusalem-pa-guardianship.html>
- Jordan Population 2020*. (2020, February 2). Dipetik March 9, 2020, dari World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/countries/jordan-population/>
- Kumoro, B. (2009). *Hamas: Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Kumaraswamy. (2003). Israel, Jordan and the Masha'al Affair. *Israel Affairs*, Vol. 9, No. 3. 111-128.
- Kedmey, D. (2015, February 3). *ISIS Video Appears to Show Jordanian Pilot Being Burned Alive*. Dipetik May 22, 2020, dari TIME: <https://time.com/3693983/isis-video-jordanian-pilot/>
- Kumaraswamy. (2001, August). *The Jordan-Hamas Divorce*. Dipetik May 24, 2020, dari Middle East Intelligence Bulletin: <http://www.mafhoum.com/press2/60P2.htm>
- Krasna, J. (2020, February 18). *Is Jordan's stability indispensable?* Dipetik May 09, 2020, dari The Jerusalem Institute for Strategy and Security: <https://jiss.org.il/en/krasna-is-jordans-stability-indispensable/>
- King Abdullah II. (2010, January 29). *Conversation Session Moderated at the World Economic Forum Annual Meeting*. (CNN, Pewawancara)
- Kouame, A. T. (2009). *The Financial Crisis: Impact on the Middle East*. Dipetik April 23, 2020, dari Development Horizons: [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentredirects?url=/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/09/000356161\\_20101109023753/Rendered/PDF/577930NEWS0ENG101public10BOX353779B.pdf](https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentredirects?url=/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/09/000356161_20101109023753/Rendered/PDF/577930NEWS0ENG101public10BOX353779B.pdf).
- Lynch, M. (1998). Jordan's Competing Nationalisms: Deliberation, Transition and Theories of Ethnic Conflict. *Middle East Studies Association*.
- Landler, M. (2017, December 6). *Trump Recognizes Jerusalem as Israel's Capital and Orders U.S. Embassy to Move*. Dipetik March 8, 2020, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html>

- Madfai, M. R. (1993). *Jordan, The United States And The Middle East Peace Process, 1974-1991*. New York: Cambridge University Press.
- Maayeh, S. (2019). The Deal of the Century and Jordan's Dilemma. *Konrad Adenauer Stiftung*, 1-4.
- Mawardi, H. C. (1991). *Dimensi Internal Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Peran Suriah*. Dalam Bartanto Bandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*. Centre for Strategic and International Studies.
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *Miqot*. Vol. 39, No. 2. 390-406.
- Mitha, F. (2010). The Jordanian-Israel Relationship: The Reality of "Cooperation". *Middle East Policy*. Vol. 17, No. 2, 105-106.
- Mekelberg, Y., & Shapland, G. (2019). Israeli-Palestinian Peacemaking: The Role of the Arab States. *Middle East and North Africa Programme*, 2-16.
- Michalak, T. (2012). The PLO and The Civil War in Jordan (1970). *Asian and African Studies*, Vol. 21, No. 1, 106-121.
- Muasher, M. (2017, August 8). *Palestinian Nationalism: Regional Perspectives*. Dipetik November 25, 2019, dari Carnegie Endowment For International Peace: <https://carnegieendowment.org/2017/09/08/jordanian-palestinian-relations-pub-73006>
- MRGI. (t.thn.). *Palestinians*. Dipetik Murch 16, 2020, dari Minority Rights Group International: <https://minorityrights.org/minorities/palestinians-2/>
- Mansour, Y. (2014, December 22). *Rentier States*. Dipetik March 10, 2020, dari The Jordan Times: <http://www.jordantimes.com/opinion/yusuf-mansur/rentier-states-0>.
- Middleeasteye.net. (2017, December 19). *The 43 times US has used veto power against UN resolutions on Israel*. Dipetik May 24, 2020, dari Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/news/43-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israel#:~:text=The%20US%20has%20used%20its%20veto%20power%2042%20other%20times,using%20the%20veto%20in%201970>.
- Middleeastmonitor.com. (2020, January 28). *Saudi Arabia and other Gulf States to fund US 'deal of the century'*. Dipetik May 22, 2020, dari Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20200128-saudi-arabia-and-other-gulf-states-to-fund-us-deal-of-the-century/>
- Microfinance in Jordan*. (t.thn.). Dipetik March 13, 2020, dari United Nations Relief and Works Agency: <https://www.unrwa.org/activity/microfinance-jordan>

- Nasur, N. I., Al-Fawwaz, A. A., & Al-Afif. (2012). Jordanian Foreign Policy toward The Palestine Issue. *British Journal of Arts and Social Sciences*, Vol.8 No.1, 1-16.
- Nasur, N. I. (2014). Jordan-United States Relations During the Reign of king Abdullah II (1999-2013). *Research on Humanities and Social Sciences* Vol.4, No.26, 66-75.
- Nakhoul, S., & Al-Khalidi, S. (2015, February 26). *Jordan takes no chances in confronting homegrown Jihadis*. Dipetik May 23, 2020, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-jordan-insight/insight-jordan-takes-no-chances-in-confronting-homegrown-jihadis-idUSKBN0LU1TU20150226>
- Nytimes.com. (1993, October 26). *Jordan's Role in Israeli-Palestinian Peace Effort*. Dipetik Murch 20, 2020, dari The New York Times : <https://www.nytimes.com/1993/10/26/opinion/1-jordan-s-role-in-israeli-palestinian-peace-effort-612593.html>
- Oudat, M. A., & Alshboul, A. (2010). "Jordan First": Tribalism, Nationalism and Legitimacy of Power in Jordan. *Intellectual Discourse*, Vol. 18, No. 1, 65-96.
- Okar, E. M. (2001). The decline of Jordanian political parties: Myth or reality? *International Journal of Middle East Studies* 33(04), 545-569.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pedatzur, R. (2013). *The Regional Implications of the Establishment of a Palestinian State*. Netanya: S. Daniel Abraham Center for Strategic Dialogue.
- Pipes, D., & Garfinkle, A. (1990). President Arafat? *Center for the National Interest*, No. 21, 97-99.
- Pengying. (2018, February 19). *Jordan, Turkey reiterate commitment to two-state solution*. Dipetik May 22, 2020, dari XinhuaNet: [http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/19/c\\_136985787.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/19/c_136985787.htm)
- Pcpsr.org. (2015, June 14). *In the past year, support for the two state solution decreases among Palestinians and Israelis; today only 51% on each side support it. Meanwhile, each side continues to view the intentions of the other as posing an existential threat*. Dipetik Murch 10, 2020, dari Palestinian Center for Poliy and Survey Research: <http://www.pcpsr.org/en/node/611>
- Paljourneys.org. (t.thn.). *Palestinians in Jordan Since 1967: A Never-Ending Normalization*. Dipetik May 20, 2020, dari Palestinian Journeys: <https://www.paljourneys.org/en/timeline/highlight/6588/palestinians-jordan-1967>
- Pew Research Report: Jordan*. (2010). Dipetik March 13, 2020, dari Pew Research Center: [http://www.globalreligiousfutures.org/countries/jordan#/?affiliations\\_re](http://www.globalreligiousfutures.org/countries/jordan#/?affiliations_re)



- ligion\_id=0&affiliations\_year=2010&region=&region\_name=All%20C  
ountries&restrictions\_year=2016
- Riedel, B. (2008). *The Search for Al Qaeda: Its Leadership, Ideology and Future*. Washington D.C: Brookings Institution Press.
- Robins, P. (2019). *International Relations Under Abdullah: In A History of Jordan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rabasa, A., Chalk, P., Cragin, K., Daly, S. A., Gregg, H. S., Karasik, T. W., et al. (2006). *Beyond al-Qaeda: Part 1, The Global Jihadist Movement*. Santa Monica: The RAND Corporation.
- Ryan, C. R. (2011). Identity Politics, Reform, and Protest in Jordan. *Studies in Ethnicity and Nationalism*: Vol. 11, No. 3, 564-578.
- Rodríguez, L. M. (2018). Patronage and Clientelism in Jordan: The Monarchy and the Tribes in the Wake of the “Arab Spring”. *Aula Mediterranea*, 1-5.
- Riedel, B. (2018, September 11). *The Oslo Accords at 25: The view from Jordan*. Dipetik February 20, 2020, dari Brookings: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/09/11/the-oslo-accords-at-25-the-view-from-jordan/>
- Rish, Z. A. (2012, August 24). *Jordan's Current Political Opposition Movements and the Need for Further Research: An Interview with Tariq Tell (Part 2)*. Dipetik April 22, 2020, dari Jadaliyya: <https://www.jadaliyya.com/Details/26936>
- Rudoren, J. (2015, March 8). *Netanyahu Comments Cast Doubt on Stance Toward Palestinians*. Dipetik April 27, 2020, dari The New York Times: [nytimes.com/2015/03/09/world/netanyahu-comments-cast-doubt-on-stance-toward-palestinians.html](http://www.nytimes.com/2015/03/09/world/netanyahu-comments-cast-doubt-on-stance-toward-palestinians.html)
- Rantawi, O. A. (2009, September 29). *Breaking apart: Hamas and Jordan's Muslim Brotherhood*. Dipetik May 27, 2020, dari The Daily Star: <http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2009/Sep-29/119564-breaking-apart-hamas-and-jordans-muslim-brotherhood.ashx>
- Reliefweb.int. (2010, February 1). *Stateless Again: Palestinian-Origin Jordanians Deprived of their Nationality*. Dipetik March 6, 2020, dari reliefweb: <https://reliefweb.int/report/jordan/stateless-again-palestinian-origin-jordanians-deprived-their-nationality>
- Snyder, R. C., Bruck, H., & Sapin, B. (2002). *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Satloff, R. (1986). *Troubles on the East Bank: Challenges to the domestic stability of Jordan*. New York: Praeger.
- Satloff, R., & Schenker, D. (2013). *Political Instability in Jordan*. New York: Council on Foreign Relations.
- Salehyan, I., & Gleditsch, K. S. (2006). Refugees and the Spread of Civil War. *International Organization*. Vol. 60, 335-366.

- Salameh, M. T., & El-Edwan, K. I. (2016). The identity crisis in Jordan: historical pathways and contemporary debates. *The Journal of Nationalism and Ethnicity*, 2-18.
- Sharp, J. M. (2019). *Jordan: Background and U.S. Relations*. Washington: Congressional Research Service.
- Siryoti, D. (2019, March 13). *Walking a Fine Line between the Bedouin and the Palestinians*. Dipetik March 16, 2020, dari Israel Hayom: <https://www.israelhayom.com/2019/03/13/walking-a-fine-line-between-the-bedouin-and-the-palestinians/>
- Sharif, O. A. (2019, November 14). *Jordan's Cold Peace With Israel Holds For Now*. Dipetik April 22, 2020, dari Gulf News: <https://foreignpolicy.com/2010/06/16/the-revolt-of-jordans-military-veterans/>
- Sharif, O. A. (2019, March 6). *Hundreds of Jordanians march toward capital demanding jobs*. Dipetik April 26, 2020, dari Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/03/jordan-youth-march-sit-in-royal-palace-unemployment.html>
- Sharif, O. A. (2020, February 3). *Why Jordan was so quick to reject Trump's peace plan*. Dipetik May 25, 2020, dari Middle East Institute: <https://www.mei.edu/publications/why-jordan-was-so-quick-reject-trumps-peace-plan>
- Saudi Arabia and other Gulf States to fund US 'deal of the century'*. (2020, January 28). Dipetik April 23, 2020, dari Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20200128-saudi-arabia-and-other-gulf-states-to-fund-us-deal-of-the-century/>
- Terrill, A. (2010). *Global Security Watch: Jordan*. California: Praeger.
- Terrill, A. (2008). *Jordanian National Security and The Future of Middle East Stability*. Carlisle: Strategic Studies Institute-U.S. Army War College.
- Tagliabue, S. M. (2014). The Two-State Solution: Is It Still Feasible?. *European Scientific Journal*, Vol. 1. 539-548.
- Tal, L. (1993). Peace for Jordan. *Royal Institute of International Affairs*. Vol. 49, No. 8/9, 168-171.
- Tell, N. (2004). Jordanian Security Sector Governance: Between Theory and Practice. *Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces, Working Paper No. 145*.
- Tawil, N. E. (2017, December 19). *United States history of veto at U.N. Security Council*. Dipetik May 24, 2020, dari Egypt Today: <https://www.egypttoday.com/Article/1/37501/United-States-history-of-veto-at-U-N-Security-Council>
- The Washington Declaration*. (1994, July 25). Dipetik November 20, 2019, dari The Library: <http://www.kinghussein.gov.jo/w-declaration.html>

- The Madrid Conference Opening Speeches*. (1991, October 31). Dipetik December 12, 2019, dari Israel Ministry Foreign Affairs: <https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/MFADocuments/Pages/ADDRESS%20BY%20DR%20KAMEL%20ABU%20JABER%20-%2031-Oct-91.aspx>
- Valentine, C. L. (2011). *The Political Implications of Palestinian Refugees: A cross-national case study*. Washington: American University .
- Weitzman, B. M. (2010). Arabs vs the Abdullah Plan. *Middle East Quarterly* , 3-12.
- Wagemaker, J. (2014). A Terrorist Organization that Never Was: The Jordanian "Bay'at al-Imam" Group. *Middle East Journal*, Vol. 68, No. 1, 59-75.
- WorldBank. (2014, August 24). *Economy and Region Specific Forecasts and Data: Middle East and North Africa*. Dipetik April 24, 2020, dari World Bank: <http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=MNA>
- Yom, S. L. (2014). The New Landscape of Jordanian Politics: Social Opposition, Fiscal Crisis, and the Arab Spring. *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No. 3, 284-300.
- Zahran, M. (2012). Jordan Is Palestine. *Middle East Quarterly*, 3-12.
- Zeevi, D. (2020). Israel and Jordan: A Peace in Ruins. *Crown Center for Middle East Studies*, No. 133, 1-7.
- Ziyon, E. o. (2020, February 18). *Jordan Tells Its Palestinian Citizens, 'We Don't Want You' (But They Call It 'Right of Return')*. Dipetik Murch 13, 2020, dari The Algemeiner: <https://www.algemeiner.com/2020/02/18/jordan-tells-its-palestinian-citizens-we-dont-want-you-but-they-call-it-ri>